



**IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM  
MENDORONG GRADUASI MANDIRI KELUARGA PENERIMA  
MANFAAT DI DESA TAMBAKMENJANGAN, KABUPATEN  
LAMONGAN**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Endah Kumala Sekar Arum  
220910201046**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
2026**



**IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM  
MENDORONG GRADUASI MANDIRI KELUARGA PENERIMA  
MANFAAT DI DESA TAMBAKMENJANGAN, KABUPATEN  
LAMONGAN**

diajukan guna memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program  
Sarjana pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Endah Kumala Sekar Arum  
220910201046**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
2026**

## PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia, rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *“Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mendorong Graduasi Mandiri Keluarga Penerima Manfaat di Desa Tambakmenjangan, Kabupaten Lamongan”*, Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, atas doa yang tidak pernah putus, dukungan yang tiada henti, dan kasih sayang yang tulus. Terima kasih karena selalu mengusahakan yang terbaik bagi penulis, mempercayai setiap pilihan yang diambil, serta memberikan kesempatan dan dukungan bagi penulis untuk terus mengejar mimpi hingga dapat menyelesaikan proses ini;
2. Adik tersayang, atas dukungan, perhatian, dan kepercayaan yang senantiasa diberikan kepada penulis. Terima kasih karena selalu hadir dalam proses penulis, memberikan semangat dan doa sehingga penulis mampu menyelesaikan proses ini;
3. Seluruh bapak/ibu guru serta dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, yang telah sabar membimbing penulis selama proses pembelajaran. Setiap ilmu, arahan, dan pengalaman yang diberikan tidak hanya menjadi pengetahuan baru, tetapi juga menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik penulis hingga saat ini, serta
4. Almamater Universitas Jember, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang penulis banggakan.

**MOTTO**

"Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji, bahwa  
sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan "

**( Q.S Al-insyirah: 5-6 )**

"Terima kasih untuk semua luka kini mendewasakan, terima kasih untuk semua  
cinta kau kan dirayakan tak beruntung soal cinta dan pertemanan, tlah ku lawan  
kecewa akan kegagalan. Bukankah hidup harus terus begitu? "

**(Salma Salsabil)**

---

<sup>1</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya, Surah Al-Insyirah (94) ayat 5–6, Jakarta: Kementerian Agama RI.

<sup>2</sup> Dikutip dari Salma Salsabil, lagu "Terima Kasih", 2023.

**PERNYATAAN ORISINALITAS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Endah Kumala Sekar Arum

NIM : 220910201046

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul *“Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mendorong Graduasi Mandiri Keluarga Penerima Manfaat di Desa Tambakmenjangan, Kabupaten Lamongan”* adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus di junjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 27 Juli 2026

Yang menyatakan,



Endah Kumala Sekar Arum  
220910201046

**HALAMAN PEMBIMBING**

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM  
MENDORONG GRADUASI MANDIRI KELUARGA PENERIMA  
MANFAAT DI DESA TAMBAKMENJANGAN, KABUPATEN  
LAMONGAN**

**Oleh:**

**Endah Kumala Sekar Arum**

**NIM: 220910201046**

**Pembimbing**

**Dosen Pembimbing Utama : Hermanto Rohman, S.Sos., M.PA.**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Skripsi ini berjudul “*Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mendorong Graduasi Mandiri Keluarga Penerima Manfaat di Desa Tambakmenjangan, Kabupaten Lamongan*” telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, pada:

Hari : Senin

Tanggal : 27 Juli 2026

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

**Pembimbing**

**1. Pembimbing Utama**

Nama : Hermanto Rohman, S.Sos., M.PA.

NIP : 197903032005011001

**Tanda Tangan**

(.....)

**Penguji**

**1. Penguji Utama**

Nama : Dr. Suji, S.Sos., M.Si

NIP : 197006152008121002

(.....)

**2. Penguji Anggota**

Nama : M. Nanda Al Hakim Akbar, S.AP., M.AP

NIP : 199809092025061008

(.....)

**ABSTRACT**

*This study examines the implementation of the Family Hope Program (Program Keluarga Harapan/PKH) in encouraging independent graduation among beneficiary families (Keluarga Penerima Manfaat/KPM) in Tambakmenjangan Village, Sarirejo Sub-district, Lamongan Regency. PKH is a national conditional cash transfer policy intended not merely to distribute financial assistance, but also to build the economic independence of poor households, with independent graduation serving as the program's key indicator of success. However, no beneficiary families (KPM) achieved self-graduation between 2023 and 2025. In 2026, only one out of 124 beneficiary families in Tambakmenjangan Village successfully attained economic self-sufficiency. This research uses a qualitative descriptive approach, with data collected through interviews, observation, and documentation involving a PKH facilitator, a district PKH coordinator, the village head, and four beneficiary families, selected through purposive sampling. Data validity was established through source and technique triangulation. The implementation of PKH is analyzed using George C. Edward III's policy implementation model, covering the dimensions of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The findings show that communication between facilitators and KPM has been running but has not fully changed beneficiaries' dependency mindset; resources are constrained by facilitators' heavy workload and unsynchronized data between the SIKS-Droid application and the central system; disposition shows that facilitators and the village government are committed to the program's goals, while most KPM still show resistance toward independent graduation; and The bureaucratic structure reveals that vertical coordination between field-level implementers and the central government remains ineffective in updating beneficiary data. Overall, the study concludes that PKH implementation in Tambakmenjangan Village has not been optimal in encouraging independent graduation, and recommends strengthening data synchronization, facilitator capacity building, and village-level economic empowerment programs.*

**Keywords:** Family Hope Program, policy implementation, independent graduation, beneficiary families.

**ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mendorong graduasi mandiri pada keluarga penerima manfaat (KPM) di Desa Tambakmenjangan, Kecamatan Sarirejo, Kabupaten Lamongan. PKH merupakan kebijakan bantuan sosial bersyarat nasional yang tidak hanya bertujuan menyalurkan bantuan keuangan, tetapi juga membangun kemandirian ekonomi rumah tangga miskin, dengan graduasi mandiri sebagai indikator utama keberhasilan program. Namun, pada periode 2023 - 2025 tidak terdapat KPM yang melakukan graduasi mandiri. Pada tahun 2026, hanya satu dari 124 KPM di Desa Tambakmenjangan yang berhasil mencapai kemandirian ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan seorang pendamping PKH, seorang koordinator PKH kabupaten, kepala desa, dan empat KPM yang dipilih secara purposive sampling. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Implementasi PKH dianalisis menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edward III yang mencakup dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antara pendamping dan KPM telah berjalan, namun belum sepenuhnya mampu mengubah pola pikir ketergantungan penerima manfaat; sumber daya masih terkendala oleh tingginya beban kerja pendamping serta belum sinkronnya data antara aplikasi SIKS-Droid dan sistem pusat; disposisi menunjukkan bahwa pendamping dan pemerintah desa memiliki komitmen terhadap tujuan program, sementara sebagian besar KPM masih menunjukkan resistensi terhadap graduasi mandiri; dan struktur birokrasi memperlihatkan bahwa koordinasi vertikal antara pelaksana di tingkat lapangan dan pemerintah pusat masih belum efektif dalam pembaruan data penerima manfaat. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi PKH di Desa Tambakmenjangan belum optimal dalam mendorong graduasi mandiri. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan sinkronisasi data, peningkatan kapasitas pendamping, dan pengembangan program pemberdayaan ekonomi di tingkat desa.

Kata kunci: Program Keluarga Harapan, implementasi kebijakan, graduasi mandiri, keluarga penerima manfaat.

## RINGKASAN

**Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Mendorong Graduasi Mandiri Keluarga Penerima Manfaat di Desa Tambakmenjangan, Kabupaten Lamongan;** Endah Kumala Sekar Arum, 220910201046; 2026; Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Kemiskinan masih menjadi persoalan mendasar dalam pembangunan sosial dan ekonomi di Indonesia, termasuk di Kabupaten Lamongan. Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasinya adalah melalui Program Keluarga Harapan (PKH), yaitu bantuan sosial bersyarat yang tidak hanya bertujuan memberikan bantuan tunai, tetapi juga mendorong keluarga penerima manfaat (KPM) mencapai kemandirian ekonomi melalui proses graduasi mandiri. Desa Tambakmenjangan, Kecamatan Sarirejo, Kabupaten Lamongan merupakan salah satu wilayah pelaksana PKH yang menunjukkan capaian graduasi mandiri sangat rendah, yaitu selama periode 2023-2025 belum terdapat KPM yang melakukan graduasi mandiri, hingga Juli 2026 dari total 124 KPM yang terdaftar di Desa Tambakmenjangan, hanya satu keluarga yang berhasil mencapai kemandirian ekonomi, sehingga penelitian ini penting dilakukan untuk memahami bagaimana implementasi PKH berjalan di desa tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan memahami implementasi PKH dalam mendorong graduasi mandiri KPM di Desa Tambakmenjangan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan informan yang dipilih secara purposive, terdiri atas satu pendamping PKH, satu koordinator PKH kabupaten, kepala desa, dan empat KPM. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian diuji keabsahannya dengan triangulasi sumber dan teknik. Analisis implementasi kebijakan menggunakan model George C. Edward III yang mencakup empat variabel, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek komunikasi, sosialisasi PKH dan graduasi mandiri telah dilakukan pendamping melalui kegiatan P2K2, namun pesan mengenai tujuan graduasi mandiri belum sepenuhnya mengubah pola pikir KPM. Dari aspek sumber daya, jumlah dan kualifikasi pendamping sosial secara formal telah sesuai pedoman, tetapi beban kerja di lapangan berat karena satu pendamping menangani tiga desa sekaligus, serta program pemberdayaan ekonomi desa yang belum berjalan optimal. Dari aspek disposisi, pendamping PKH dan pemerintah desa menunjukkan komitmen terhadap tujuan kebijakan, sementara mayoritas KPM masih menunjukkan resistensi terhadap graduasi mandiri akibat mentalitas ketergantungan, meskipun terdapat satu KPM yang berhasil graduasi mandiri pada tahun 2026 karena perubahan kondisi ekonomi dan kesadaran internal.

Dari aspek struktur birokrasi, koordinasi horizontal antara pendamping dan pemerintah desa berjalan cukup baik, tetapi koordinasi vertikal dengan sistem pusat masih terkendala ketidaksinkronan data serta keterbatasan kewenangan desa dalam memperbarui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Secara keseluruhan, implementasi PKH di Desa Tambakmenjangan dalam mendorong graduasi mandiri belum berjalan optimal, sebagaimana tercermin dari rendahnya capaian graduasi mandiri. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sinkronisasi data antara sistem pusat dan aplikasi SIKS-Droid, penguatan kapasitas pendamping sosial melalui pelatihan komunikasi persuasif, pengembangan program pemberdayaan ekonomi bagi KPM di tingkat desa, serta optimalisasi pendekatan personal dan kegiatan P2K2 untuk membangun motivasi dan kemandirian keluarga penerima manfaat.



## PRAKATA

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mendorong Graduasi Mandiri Keluarga Penerima Manfaat di Desa Tambakmenjangan, Kabupaten Lamongan". Keberadaan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (SI) Program Studi Ilmu Administrasi Negara pada Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Penyusunan dan penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan kontribusi tidak langsung dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Suyani Indriastuti, S.Sos., M.Si., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ilmu. Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Ibu Dr. Dina Suryawati, S.Sos., M.AP., CIQaR selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember sekaligus ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Bapak Drs. Boedijono, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang senantiasa memberikan pendampingan selama masa perkuliahan, khususnya dalam proses akademik;
4. Bapak Hermanto Rohman, S.Sos., M.PA. selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta dukungan dengan penuh kesabaran, sehingga penulis dapat memahami banyak hal dalam proses penyusunan skripsi ini;
5. Para tim penguji, Bapak Dr. Suji, S.Sos., M.Si dan Bapak M. Nanda Al Hakim Akbar, S.AP., M.AP yang telah memberikan masukan dan saran yang membangun, sehingga penulis mendapatkan perspektif yang lebih luas;

6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen serta Civitas Akademika Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, atas ilmu dan pengalaman yang telah diberikan selama masa perkuliahan.
7. Untuk sahabat-sahabatku Aisyah, Aini, Dian, Errina, Khoyim, Dewi, terima kasih telah menemani penulis sejak awal semester hingga akhir semester hingga sampai semester akhir ini, terimakasih telah kebersamai setiap perjalanan selama menempuh pendidikan hingga terselesaikannya skripsi ini. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, semangat, doa, serta segala cerita yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Terima kasih telah saling menguatkan di tengah berbagai tantangan, berbagi ilmu, bertukar pikiran, dan menjadi tempat berbagi suka maupun duka selama masa perkuliahan. Kehadiran kalian telah memberikan banyak warna, pelajaran, dan kenangan yang tidak akan terlupakan;
8. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada UKM Marching Band Symphony Rama Universitas Jember (MBSR) yang telah menjadi rumah kedua selama masa perkuliahan. Terima kasih atas setiap pengalaman, kebersamaan, serta pelajaran berharga yang diberikan. Di tempat inilah penulis belajar arti tanggung jawab, disiplin, kerja sama, kepemimpinan, dan bagaimana berproses dalam sebuah organisasi. Terima kasih telah menjadi ruang untuk bertumbuh, menempa karakter, serta menghadirkan begitu banyak kenangan yang akan selalu dikenang;
9. Dengan penuh rasa cinta dan hormat, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mama tercinta. Terima kasih karena telah menjadi sosok yang selalu hadir, tetap memilih untuk merawat, menjaga, menyayangi, dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang di setiap keadaan. Terima kasih atas setiap pengorbanan, doa, tenaga, dan air mata yang mungkin tidak pernah penulis ketahui. Terima kasih karena tidak pernah berhenti mengusahakan agar penulis selalu merasa cukup, baik dalam kasih sayang, perhatian, maupun kebutuhan hidup, meskipun harus menghadapi berbagai kesulitan seorang diri. Terima kasih karena telah menjadi perempuan yang begitu kuat dan tangguh. Segala pencapaian penulis hingga berada di titik ini tidak akan pernah terwujud tanpa doa, perjuangan, dan ketulusan Mama. Semoga suatu hari nanti penulis

dapat menjadi alasan di balik senyum dan kebahagiaan Mama, sebagaimana Mama selalu menjadi alasan penulis untuk terus bertahan dan berjuang;

10. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada adik tersayang Habibah Nailatul Izzah. Terima kasih karena telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, menjadi sumber semangat, serta menghadirkan kebahagiaan di tengah berbagai proses yang telah dilalui. Terima kasih atas setiap doa, perhatian, dukungan, dan pengertian yang diberikan;
11. Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada Tante dan om beserta seluruh keluarga atas segala kebaikan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Jember. Terima kasih karena telah memberikan tempat tinggal, menerima penulis dengan penuh kehangatan, serta menghadirkan rasa nyaman layaknya berada di rumah sendiri. Kepedulian, perhatian, dan dukungan yang diberikan menjadi salah satu kekuatan bagi penulis untuk terus bertahan dan menyelesaikan setiap proses perkuliahan hingga skripsi ini;
12. Terakhir, saya berterimakasih kepada sosok gadis cantik dan kuat yang diam-diam berjuang tanpa henti. Terimakasih kepada peneliti skripsi ini yaitu diriku sendiri, Endah Kumala Sekar Arum, terima kasih karena telah bertahan sejauh ini. Terima kasih telah memilih untuk tetap bangkit, meskipun kehidupan tidak selalu berjalan sesuai harapan. Terima kasih telah kuat menghadapi berbagai ujian, termasuk ketika harus menerima kenyataan bahwa keluarga yang dahulu menjadi tempat pulang tidak lagi berjalan bersama. Tidak mudah melewati semua itu, tetapi kamu berhasil membuktikan bahwa luka tidak harus menghentikan langkah untuk terus mengejar mimpi. Terima kasih karena tetap berusaha menjadi anak yang membanggakan kedua orang tua, meskipun keadaan telah berubah. Terima kasih telah tetap percaya bahwa setiap proses memiliki hikmah, setiap air mata memiliki makna, dan setiap perjuangan akan menemukan hasil pada waktunya. Penulis bangga karena tidak menyerah, tetap memilih untuk belajar, bertumbuh, dan menyelesaikan apa yang telah dimulai hingga skripsi ini dapat terselesaikan;

## DAFTAR ISI

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| <b>COVER.....</b>                         | <b>i</b>     |
| <b>HALAMAN JUDUL.....</b>                 | <b>ii</b>    |
| <b>PERSEMBAHAN.....</b>                   | <b>iii</b>   |
| <b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>       | <b>v</b>     |
| <b>HALAMAN PEMBIMBING .....</b>           | <b>vi</b>    |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>          | <b>vii</b>   |
| <b>ABSTRACT .....</b>                     | <b>viii</b>  |
| <b>ABSTRAK .....</b>                      | <b>ix</b>    |
| <b>RINGKASAN .....</b>                    | <b>x</b>     |
| <b>PRAKATA .....</b>                      | <b>xii</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                    | <b>xv</b>    |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                 | <b>xviii</b> |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>                 | <b>xix</b>   |
| <b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>           | <b>1</b>     |
| 1.1 Latar Belakang.....                   | 1            |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                 | 10           |
| 1.3 Tujuan Penelitian.....                | 10           |
| 1.4 Manfaat Penelitian.....               | 10           |
| <b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>       | <b>12</b>    |
| 2.1 Landasan Teori .....                  | 12           |
| 2.1.1 Kebijakan Publik.....               | 12           |
| 2.1.2 Implementasi Kebijakan Publik.....  | 16           |
| 2.1.3 Program Keluarga Harapan (PKH)..... | 23           |
| 2.1.4 Graduasi Mandiri .....              | 28           |
| 2.1 Penelitian Terdahulu.....             | 31           |
| 2.2 Kerangka Pikir .....                  | 33           |
| <b>BAB 3. METODE PENELITIAN.....</b>      | <b>38</b>    |

|                                                                                                   |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian .....                                                         | 38        |
| 3.2 Penentuan Lokasi Penelitian.....                                                              | 38        |
| 3.3 Fokus Penelitian .....                                                                        | 38        |
| 3.4 Penentuan Informan Penelitian.....                                                            | 39        |
| 3.5 Teknik Pengumpulan Data .....                                                                 | 40        |
| 3.6 Keabsahan Data .....                                                                          | 41        |
| 3.7 Teknik Analisis Data .....                                                                    | 43        |
| <b>BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>                                                          | <b>44</b> |
| 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....                                                          | 44        |
| 4.2 Hasil Penelitian.....                                                                         | 47        |
| 4.2.1 Landasan Regulasi Pelaksanaan PKH dan Graduasi Mandiri                                      | 47        |
| 4.2.2 Aktor dan Pembagian Peran dalam Implementasi PKH.....                                       | 49        |
| 4.2.3 Mekanisme Kerja dan Pelaksanaan PKH di Desa<br>Tambakmenjangan .....                        | 51        |
| 4.2.4 Tahapan Proses Graduasi Mandiri di Desa Tambakmenjangan<br>.....                            | 56        |
| 4.2.5 Dinamika Respons Keluarga Penerima Manfaat terhadap<br>Proses Graduasi .....                | 60        |
| 4.2.6 Kendala dalam Pelaksanaan Implementasi PKH dalam<br>mendorong Graduasi Mandiri .....        | 61        |
| 4.3 Pembahasan .....                                                                              | 62        |
| 4.2.1 Komunikasi.....                                                                             | 63        |
| 4.2.2 Sumber Daya .....                                                                           | 64        |
| 4.2.3 Disposisi .....                                                                             | 64        |
| 4.2.4 Struktur Birokrasi .....                                                                    | 65        |
| 4.2.5 Hambatan Implementasi PKH dalam mendorong Graduasi<br>Mandiri di Desa Tambakmenjangan ..... | 66        |
| <b>BAB 5. PENUTUP.....</b>                                                                        | <b>61</b> |
| 5.1 Kesimpulan.....                                                                               | 61        |
| 5.2 Saran .....                                                                                   | 62        |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b> | <b>65</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>       | <b>68</b> |

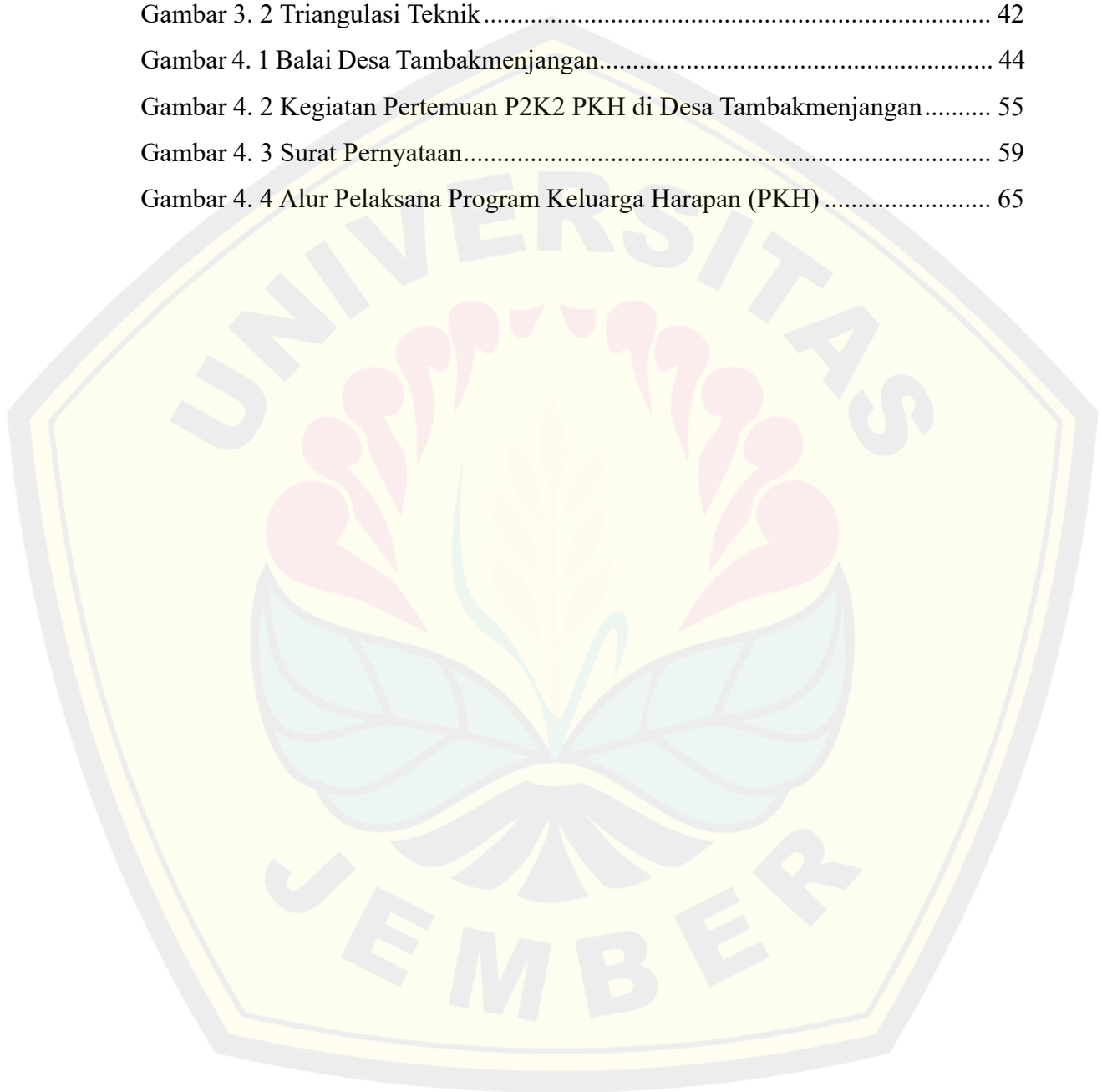


## DAFTAR TABEL

|                                                                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1. 1 Tren Kemiskinan di Indonesia dan Kabupaten Lamongan Tahun 2023-2025.....                                        | 1  |
| Tabel 1. 2 Data Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Tambakmenjangan 2023-2026.....  | 7  |
| Tabel 1. 3 Data Jumlah Graduasi Mandiri Kabupaten – Desa 2023-2025.....                                                    | 7  |
| Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....                                                                                       | 31 |
| Tabel 3. 1 Informan Penelitian .....                                                                                       | 39 |
| Tabel 4. 1 Data Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Tambakmenjangan 2023-2026.....  | 45 |
| Tabel 4. 2 Data Informan .....                                                                                             | 46 |
| Tabel 4.3 Landasan Regulasi Pelaksanaan PKH dan Graduasi Mandiri.....                                                      | 48 |
| Tabel 4. 4 Data Jumlah KPM Wilayah dampingan Bapak Rudi (Pendamping PKH).....                                              | 50 |
| Tabel 4. 5 Alur Penetapan dan Verifikasi KPM .....                                                                         | 53 |
| Tabel 4. 6 Data Jumlah Graduasi Mandiri Kabupaten Lamongan, Kecamatan Sarirejo, Desa Tambakmenjangan Tahun 2023-2025 ..... | 60 |

**DAFTAR GAMBAR**

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 2. 1 Model Implementasi George C. Edward III.....             | 22 |
| Gambar 2. 2 Alur proses Graduasi PKH .....                           | 30 |
| Gambar 2. 3 Kerangka Pikir.....                                      | 34 |
| Gambar 3. 1 Triangulasi Sumber .....                                 | 42 |
| Gambar 3. 2 Triangulasi Teknik.....                                  | 42 |
| Gambar 4. 1 Balai Desa Tambakmenjangan.....                          | 44 |
| Gambar 4. 2 Kegiatan Pertemuan P2K2 PKH di Desa Tambakmenjangan..... | 55 |
| Gambar 4. 3 Surat Pernyataan.....                                    | 59 |
| Gambar 4. 4 Alur Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) .....      | 65 |



## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan isu sentral dalam pembangunan sosial dan ekonomi di berbagai negara, termasuk Indonesia (Fernandya *et al.*, 2022). Rumah tangga miskin menghadapi berbagai kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Meskipun tren penurunan angka kemiskinan secara nasional terus mengalami perbaikan, jutaan masyarakat masih berada di bawah garis kemiskinan. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya akses terhadap layanan dasar dan kualitas hidup masyarakat miskin. Untuk merespons permasalahan tersebut, pemerintah mengembangkan berbagai program perlindungan sosial yang tidak hanya bertujuan mengurangi beban ekonomi, tetapi juga mendorong kemandirian keluarga miskin melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia (Ebriyani, 2025).

Tren kemiskinan di Indonesia menunjukkan penurunan secara bertahap, namun jumlah penduduk miskin masih tergolong tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan pengentasan kemiskinan telah memberikan dampak positif, permasalahan kemiskinan tetap menjadi tantangan serius. Pola yang relatif juga terlihat pada tingkat Provinsi Jawa Timur dan Lamongan.

Tabel 1. 1 Tren Kemiskinan di Indonesia dan Kabupaten Lamongan Tahun 2023-2025

| Tahun | Indonesia | Jawa Timur | Kabupaten Lamongan |
|-------|-----------|------------|--------------------|
| 2023  | 25.614,74 | 4.188,81   | 149,94             |
| 2024  | 24.054,72 | 3.982,69   | 146,98             |
| 2025  | 23.359,71 | 3.875,88   | 145,45             |

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), Data Kemiskinan Indonesia dan Provinsi Jawa timur, 2023-2025

Berdasarkan data di atas kemiskinan masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian serius, termasuk di Kabupaten Lamongan. kemiskinan masih menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian serius, termasuk di Kabupaten Lamongan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah menjalankan berbagai program perlindungan sosial, salah satunya Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan tunai, tetapi juga diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia agar keluarga miskin dapat mencapai kemandirian.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu kebijakan perlindungan sosial pemerintah Indonesia yang dilaksanakan dalam bentuk bantuan sosial bersyarat (*conditional cash transfer*) (Nurkhalim et.al., 2022). Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, PKH bertujuan meningkatkan taraf hidup keluarga miskin melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Program ini tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan tunai, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memutus rantai kemiskinan antargenerasi dan alam pelaksanaannya, PKH mencakup komponen pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial yang disertai kewajiban tertentu bagi keluarga penerima manfaat (Nurjanah, 2022). Melalui mekanisme tersebut, pemerintah berharap keluarga penerima manfaat tidak terus bergantung pada bantuan sosial, melainkan mampu mencapai kondisi mandiri melalui proses graduasi, khususnya graduasi mandiri (Fitri *et al.*, 2023).

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) didasarkan pada berbagai regulasi dan pedoman teknis yang menjadi acuan implementasi program. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan yang mengatur sasaran, mekanisme, serta pelaksanaan PKH. Selain itu, proses graduasi keluarga penerima manfaat diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 03/3/BS.01.02/10/2020 tentang Petunjuk Teknis Graduasi KPM PKH. Regulasi tersebut menegaskan bahwa tujuan akhir PKH bukan hanya penyaluran bantuan sosial, tetapi juga mendorong kemandirian keluarga penerima manfaat melalui graduasi mandiri.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH berkontribusi terhadap peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan bagi keluarga miskin

serta mendorong perubahan perilaku penerima manfaat. Sugiarto (2024) menjelaskan bahwa melalui proses pendampingan, penerima manfaat menunjukkan peningkatan kesadaran terhadap pentingnya pendidikan anak dan pemeriksaan kesehatan ibu serta balita. Temuan tersebut diperkuat oleh Musliyandi *et al.* (2024) yang menjelaskan bahwa PKH tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga pada perubahan sikap dan perilaku sosial. Komarawati *et al.* (2025) menambahkan bahwa PKH berperan dalam membangun pola pikir yang produktif sehingga penerima manfaat tidak hanya menjadi penerima bantuan pasif, tetapi mulai berupaya meningkatkan kemandirian.

Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan ideal PKH dengan kenyataan pelaksanaannya di lapangan. Sebagian keluarga penerima manfaat masih menganggap PKH sebagai sumber pendapatan jangka panjang, bukan sebagai alat sementara untuk membangun kemampuan dan kemandirian ekonomi. Sikap pasif dan ketergantungan pada bantuan sosial masih kuat, sehingga upaya menuju graduasi mandiri tidak berjalan maksimal. Hal ini menandakan bahwa masalah utama PKH bukan hanya pada rancangan kebijakan, melainkan juga pada pelaksanaannya, khususnya dalam mendorong perubahan *mindset* keluarga penerima manfaat.

Secara keseluruhan, temuan-temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) berfungsi sebagai instrumen kebijakan sosial yang lebih dari sekadar pendistribusian bantuan keuangan, melainkan sebagai pendekatan utama untuk merangsang perubahan pola perilaku dan membangun pondasi ketahanan ekonomi bagi keluarga berpenghasilan (Ukhti, 2026). Landasan dari strategi ini adalah keyakinan bahwa kemiskinan memiliki dimensi yang luas; tidak sekadar masalah ketiadaan modal finansial, melainkan juga terkait dengan keterbatasan keterampilan dan akses ke layanan publik yang mendasar. Atas dasar itulah, PKH melangkah lebih jauh dari sekadar pemberian bantuan materi dengan mengintegrasikan sistem pendidikan sosial serta peningkatan kapasitas diri penerima manfaat melalui penguatan sektor kesehatan dan pendidikan. (Nurkhalim *et al.*, 2022). Dengan demikian, menurut (Beni *et al.*, 2023) PKH mendorong

keluarga yang kurang mampu untuk berinvestasi pada anak-anak mereka sebagai jalan keluar primer dari lingkaran kemiskinan yang berkepanjangan.

Selain itu bimbingan intensif dari pendamping PKH di lapangan sangat penting untuk membina komunikasi dua arah antara pemerintah dan komunitas miskin, yang pada akhirnya menghasilkan transformasi sosial yang nyata, di mana para penerima tidak sekadar diminta mematuhi ketentuan program, tetapi juga diarahkan untuk melakukan introspeksi mendalam tentang cara meningkatkan kualitas hidup melalui kegiatan ekonomi yang menguntungkan, pengelolaan keuangan rumah tangga yang bijak, serta keterlibatan yang lebih proaktif dalam masyarakat (Kanuna & Nawawi, 2022).

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemandirian keluarga penerima manfaat, Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki indikator keberhasilan yang dikenal dengan istilah graduasi, yaitu proses keluarnya keluarga dari kepesertaan program karena telah mengalami perubahan kondisi sosial ekonomi. Graduasi menjadi tolak ukur implementasi PKH karena menunjukkan sejauh mana penerima manfaat mengalami peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi secara berkelanjutan (Lilis *et al.*, 2023).

Graduasi terbagi menjadi dua jenis, yakni graduasi alamiah dan graduasi mandiri (Permensos, No. 2 tahun 2018). Graduasi alamiah terjadi ketika KPM tidak lagi memenuhi kriteria kepesertaan program, misalnya karena anak telah menyelesaikan pendidikan atau tidak lagi memenuhi komponen kesehatan seperti ibu hamil dan balita. Sementara itu, graduasi mandiri merupakan kondisi ideal di mana keluarga penerima manfaat secara sukarela menyatakan mampu keluar dari program karena telah memiliki kemandirian ekonomi dan kesejahteraan yang memadai (Rizky *et.al.*, 2025).

Penelitian ini difokuskan pada fenomena graduasi mandiri karena inilah yang paling mencerminkan keberhasilan substantif Program PKH dalam mendorong kemandirian keluarga penerima manfaat (Kartika *et.al.*, 2025). Graduasi mandiri tidak hanya menunjukkan peningkatan kondisi ekonomi, tetapi juga perubahan sikap dan pola pikir keluarga dalam melepaskan ketergantungan terhadap bantuan pemerintah. Menurut (Lilis *et al.*, 2023) Proses ini sangat

dipengaruhi oleh peran pendamping sosial dalam membangun kesadaran, kepercayaan diri, dan motivasi keluarga untuk memanfaatkan potensi ekonomi yang dimiliki. Meskipun demikian, jalur menuju graduasi mandiri tidaklah sederhana, mengingat masih banyak keluarga penerima yang berpikiran pasif dan belum menyadari bahwa PKH hanya bersifat sementara serta bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mandiri.

Meskipun PKH telah dirancang untuk mendorong kemandirian, proses menuju graduasi mandiri tidak selalu berjalan mudah (Meri, 2023). Sebagian KPM masih memiliki pola pikir pasif dan menganggap bantuan sosial sebagai sumber penghidupan utama (Meri, 2023). Oleh karena itu, kemampuan pendamping sosial dalam mentransfer pengetahuan, memotivasi, dan menumbuhkan kesadaran menjadi faktor penting dalam mengubah pola pikir KPM. Keberhasilan PKH tidak hanya diukur dari aspek administratif, tetapi juga dari sejauh mana program ini mampu membangun mentalitas mandiri dan perilaku produktif pada keluarga penerima manfaat (Khoiriyah, 2025).

Dhea *et.al.*, (2025) Mengatakan pelaksanaan Program Harapan Keluarga (PKH) melibatkan berbagai aktor dari tingkat nasional hingga tingkat desa. Kementerian Sosial Republik Indonesia bertindak sebagai pembuat kebijakan dan pengelola program di tingkat nasional, sementara Dinas Sosial Kabupaten Lamongan melaksanakan fungsi koordinasi dan pengawasan di tingkat regional (Dhea *et.al.*, 2025). Pada tingkat desa, implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) melibatkan sejumlah aktor yang saling berinteraksi dan memiliki peran penting. Pendamping sosial PKH menjadi aktor kunci karena berhadapan langsung dengan keluarga penerima manfaat (KPM) melalui kegiatan verifikasi dan pemutakhiran data, pendampingan sosial, fasilitasi pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2/FDS), serta upaya mendorong perubahan pola pikir dan perilaku KPM menuju kemandirian (Awalyah, 2025). Pemerintah desa berperan dalam mendukung pelaksanaan PKH melalui penyediaan data, koordinasi lintas sektor, serta pengintegrasian program PKH dengan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan desa (Musliyandi, 2024). Sementara itu Musliyandi (2024) juga mengatakan bahwa KPM sebagai subjek utama program diharapkan tidak hanya

menerima bantuan, tetapi juga berpartisipasi aktif dalam memenuhi kewajiban dan menginternalisasi nilai-nilai kemandirian. Selain itu, fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan, seperti sekolah, posyandu, dan puskesmas, turut mendukung pemenuhan komitmen KPM sesuai ketentuan PKH, sehingga koordinasi antaraktor menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi PKH di tingkat desa.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan kebijakan nasional yang dirancang oleh pemerintah pusat dan diimplementasikan secara berjenjang hingga tingkat desa melalui regulasi, pedoman teknis, serta struktur pelaksana yang telah ditetapkan (Sofianto, 2020). Dalam pelaksanaannya, pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial menetapkan mekanisme program, kriteria penerima manfaat, hingga petunjuk teknis graduasi (Nawawi, 2022). Selanjutnya kebijakan tersebut dijalankan oleh Dinas Sosial daerah dan pendamping sosial PKH di tingkat lapangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi PKH cenderung menggunakan pendekatan *top down*, di mana arah kebijakan, tujuan program, dan mekanisme pelaksanaan telah ditentukan dari tingkat pusat untuk kemudian dilaksanakan oleh aktor pelaksana di daerah.

Desa Tambakmenjangan, Kabupaten Lamongan merupakan salah satu wilayah yang menerima manfaat dari Program Keluarga Harapan. Program ini melibatkan berbagai keluarga dengan tingkat ekonomi yang berbeda-beda dan dalam pelaksanaannya masih terdapat KPM yang menunjukkan ketergantungan pada bantuan sosial (Nawawi, 2022). Namun di sisi lain, mulai muncul indikasi perubahan perilaku positif, seperti meningkatnya kesadaran akan pendidikan anak dan keterlibatan dalam kegiatan ekonomi produktif. Kondisi ini menunjukkan bahwa Desa Tambakmenjangan memiliki potensi sebagai lokasi penelitian untuk mengkaji implementasi PKH dalam mendorong graduasi mandiri (Musliyandi *et al.*, 2024).

Tabel 1. 2 Data Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Tambakmenjangan 2023-2026

| Tahun | Jumlah KPM | Graduasi Mandiri |
|-------|------------|------------------|
| 2023  | 83         | 0                |
| 2024  | 128        | 0                |
| 2025  | 147        | 0                |
| 2026  | 124        | 1                |

Sumber: Dinas Sosial Lamongan

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tambakmenjangan, Kabupaten Lamongan, memperlihatkan dinamika implementasi program perlindungan sosial di tingkat desa. Berdasarkan informasi dari pendamping sosial setempat, ada sejumlah rumah tangga yang tercatat sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) PKH dengan beragam kondisi sosial-ekonomi. Program ini telah membantu KPM dalam memenuhi kebutuhan dasar, terutama terkait akses pendidikan bagi anak dan layanan kesehatan bagi ibu hamil, balita, lansia, serta penyandang disabilitas (Putra & Pujiyanto, 2020). Meskipun demikian, menurut (Beni et al., 2023) dalam proses implementasinya, masih terdapat berbagai hambatan yang mempengaruhi upaya mendorong KPM untuk keluar dari program secara mandiri. Sebagian KPM masih memaknai PKH sebatas sebagai bantuan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, sementara pemahaman mengenai pemanfaatan program sebagai sarana peningkatan kapasitas dan kemandirian ekonomi keluarga belum sepenuhnya berkembang (Kafera, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa perubahan pola pikir menjadi aspek pentingnya dalam keberhasilan implementasi PKH menuju graduasi mandiri.

Tabel 1. 3 Data Jumlah Graduasi Mandiri Kabupaten - Desa 2023-2025

| Tahun | Kabupaten<br>Lamongan | Kecamatan Sarirejo | Desa<br>Tambakmenjangan |
|-------|-----------------------|--------------------|-------------------------|
| 2023  | 30                    | 0                  | 0                       |
| 2024  | 193                   | 7                  | 0                       |
| 2025  | 461                   | 13                 | 0                       |

Sumber: Dinas Sosial Lamongan

Pemilihan Desa Tambakmenjangan sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa desa ini memiliki jumlah penerima PKH yang cukup tinggi di wilayah Lamongan, namun capaian graduasi mandiri masih tergolong sangat rendah. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan program dengan realitas pelaksanaan di lapangan. Melalui pendekatan kualitatif penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan proses, tantangan serta praktik implementasi PKH ditingkat desa, sehingga dapat menjadi bahan masukan pemerintah daerah dan pendamping sosial dalam memperkuat pelaksanaan program menuju kemandirian keluarga penerima manfaat (Andini *et al.*, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat adanya kesenjangan antara tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mendorong kemandirian keluarga miskin dengan realitas capaian graduasi mandiri di tingkat desa. Permasalahan utama dalam implementasi PKH di Desa Tambakmenjangan tidak hanya terletak pada mekanisme penyaluran bantuan, tetapi juga pada belum optimalnya perubahan pola pikir (*mindset*) keluarga penerima manfaat (KPM). Meskipun secara ekonomi beberapa keluarga menunjukkan peningkatan kapasitas, kesadaran untuk melakukan graduasi mandiri masih sangat rendah. Muncul fenomena ketergantungan (*dependency mentality*), di mana KPM cenderung merasa "nyaman" berada di zona bantuan dan khawatir kehilangan jaring pengaman sosial jika mereka menyatakan mandiri (Kanuna, 2022). Rendahnya angka graduasi mandiri di Desa Tambakmenjangan menjadi indikasi bahwa pesan substantif dari kebijakan PKH belum terinternalisasi dengan baik oleh penerima manfaat. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana implementasi PKH dijalankan dalam mendorong keluarga penerima manfaat menuju graduasi mandiri. Penelitian ini difokuskan pada Desa Tambakmenjangan, Kabupaten Lamongan, guna memahami proses implementasi, tantangan yang dihadapi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan PKH dalam mendorong graduasi mandiri melalui perubahan pola pikir keluarga penerima manfaat.

Rendahnya tingkat graduasi mandiri di Desa Tambakmenjangan diduga dipengaruhi oleh berbagai kendala dalam implementasi kebijakan. Dari sisi komunikasi, masih terdapat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memandang

PKH sebatas bantuan tunai rutin sehingga tujuan program untuk menciptakan kemandirian belum dipahami secara menyeluruh. Dari sisi sumber daya, keterbatasan kemampuan serta intensitas pendampingan sosial dapat memengaruhi proses perubahan pola pikir KPM. Selain itu, aspek disposisi pelaksana juga berperan penting, terutama terkait komitmen dan strategi pendamping dalam mendorong graduasi mandiri. Sementara itu, pada aspek struktur birokrasi, koordinasi antara pendamping sosial, pemerintah desa, dan Dinas Sosial menjadi faktor yang turut menentukan keberhasilan pelaksanaan PKH. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edward III yang menitikberatkan pada empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Berdasarkan penelitian terdahulu, kajian mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) umumnya masih berfokus pada efektivitas program, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta dampak bantuan sosial terhadap akses pendidikan dan kesehatan. Sementara itu, penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi PKH dalam mendorong graduasi mandiri keluarga penerima manfaat masih relatif terbatas, terutama pada tingkat desa. Selain itu, sebagian besar penelitian belum menyoroti bagaimana proses implementasi kebijakan, seperti komunikasi pelaksana, ketersediaan sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi mempengaruhi perubahan pola pikir keluarga penerima manfaat menuju kemandirian. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mendorong graduasi mandiri keluarga penerima manfaat di Desa Tambakmenjangan menggunakan perspektif studi implementasi kebijakan publik. Penelitian ini akan menggunakan Model George C. Edwards III sebagai pisau analisis, Model implementasi ini digunakan sebagai pisau analisis karena menekankan empat variabel penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi, yang dinilai relevan untuk menganalisis pelaksanaan PKH dalam mendorong graduasi mandiri keluarga penerima manfaat di Desa Tambakmenjangan (Rulinawaty, 2013).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimanakah Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mendorong graduasi mandiri keluarga penerima manfaat (KPM) di Desa Tambakmenjangan, Kabupaten Lamongan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk mendeskripsikan dan memahami implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mendorong graduasi mandiri KPM di Desa Tambakmenjangan, Kabupaten Lamongan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam kajian implementasi kebijakan sosial. Penelitian ini dapat memperkaya referensi akademik mengenai implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mendorong graduasi mandiri keluarga penerima manfaat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkuat kajian teoritis terkait implementasi kebijakan publik, khususnya penggunaan model implementasi kebijakan dalam menganalisis pelaksanaan program perlindungan sosial di tingkat desa.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Pemerintah dan Dinas Sosial**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi pemerintah daerah serta Dinas Sosial dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan, khususnya dalam upaya mendorong tercapainya graduasi mandiri keluarga penerima manfaat.

#### **b. Bagi Pendamping Program Keluarga Harapan**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai praktik implementasi PKH di lapangan sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas pendampingan kepada keluarga penerima manfaat.

**c. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji implementasi kebijakan sosial, khususnya yang berkaitan dengan program perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan.



## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Landasan Teori

#### 2.1.1 Kebijakan Publik

##### a. Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Fauzan (2024), kebijakan publik merupakan keputusan mengikat yang menjadi acuan atau pedoman bertindak bagi organisasi pemerintah maupun organisasi lainnya, yang memiliki tujuan, aktivitas, serta laporan yang harus dipertanggungjawabkan kepada instansi dan masyarakat guna memberikan solusi dalam menjawab persoalan di tengah kehidupan warga negara. Proses pembentukan kebijakan publik ini muncul dari interaksi antara aspek politik dan administratif, yang melibatkan berbagai pihak terkait, serta dipengaruhi oleh nilai-nilai, kepentingan, dan kondisi sosial ekonomi yang ada di masyarakat.

Menurut Andi (2024) Dalam konteks kesejahteraan sosial, kebijakan publik menjadi instrumen penting negara untuk mengurangi kemiskinan, ketimpangan sosial, dan kerentanan ekonomi. Program-program bantuan sosial, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), merupakan bentuk konkret kebijakan publik yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin dan rentan.

##### b. Tujuan Kebijakan Publik

Pemerintah menyusun kebijakan publik dengan tujuan akhir mencapai kesejahteraan sosial. Menurut Wahyudi (2021) dalam buku kebijakan publik: Evaluasi, Reformasi, Formulasi, tujuan dari kebijakan publik dapat dikategorikan ke dalam empat dimensi utama: dalam buku kebijakan publik: Evaluasi, Reformasi, Formulasi, tujuan dari kebijakan publik dapat dikategorikan ke dalam empat dimensi utama: sumberdaya, Regulatif dan Deregulatif, Dinamisasi dan Stabilisasi, penguatan negara dan pasar

1. Sumber daya (*Resource*): kebijakan ini berfungsi untuk mendistribusikan atau menyerap kekayaan negara. Sebagai contoh kebijakan otonomi daerah yang memberikan hak kepada pemerintah daerah untuk mengelola potensi lokalnya.

2. Regulatif dan Deregulatif: Kebijakan regulatif berperan dalam mengatur dan membatasi (misalnya regulasi HAM, tarif, serta pengadaan barang dan jasa). Sebaliknya, kebijakan deregulatif memberikan kebebasan atau kelonggaran, seperti kebijakan privatisasi.
3. Dinamisasi dan Stabilisasi: Dinamisasi bertujuan mendorong pemanfaatan sumber daya nasional demi kemajuan tertentu, contohnya desentralisasi. Sementara itu, stabilisasi berfungsi sebagai kendali agar perubahan tidak terjadi terlalu cepat dan merusak tatanan politik, ekonomi, sosial, atau keamanan (seperti kebijakan keamanan nasional).
4. Penguatan Negara dan Pasar: Kebijakan dapat diarahkan untuk memperbesar andil negara (misalnya sistem pendidikan nasional yang didominasi pemerintah) atau sebaliknya, memperkuat sektor publik dan mekanisme pasar (seperti privatisasi BUMN).

#### c. Proses Kebijakan Publik

Proses kebijakan publik didefinisikan sebagai serangkaian tahapan atau tata cara yang dilewati dalam merumuskan sebuah kebijakan. Merujuk pandangan Hill dalam Keban (2014), esensi dari kebijakan publik terletak pada penentuan berbagai pilihan kebijakan yang mencakup keseluruhan siklus fasenya. Secara teoretis, penetapan pilihan-pilihan tersebut dilandasi oleh beragam faktor serta pertimbangan spesifik yang selanjutnya diejawantahkan ke dalam model-model kebijakan publik. Lebih lanjut, Keban (2014) mengklasifikasikan proses kebijakan publik ini ke dalam beberapa tahapan krusial, antara lain:

##### 1. Tahapan Kebijakan Publik

Menurut Dunn (Keban, 2014), proses kebijakan publik terdiri dari beberapa fase krusial, yaitu:

- Penyusunan Agenda (*Agenda Setting*): Proses mengidentifikasi dan menentukan masalah publik yang krusial untuk diselesaikan oleh pemerintah.
- Formulasi Kebijakan (*Policy Formulation*): Tahap merancang berbagai opsi solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Analisis kebijakan menggunakan prosedur peramalan (*forecasting*) pada fase

ini untuk memprediksi dampak dari setiap pilihan kebijakan yang tersedia.

- Adopsi Kebijakan (*Policy Adoption*): Proses penetapan alternatif kebijakan terpilih setelah mendapatkan legitimasi dan dukungan dari pihak legislatif serta administrator melalui proses rekomendasi.
- Implementasi Kebijakan (*Policy Implementation*): Pengoperasian kebijakan yang telah disepakati oleh instansi pelaksana dengan menggerakkan anggaran dan sumber daya yang tersedia.
- Penilaian Kebijakan (*Policy Assessment*): Tahap pengawasan dan evaluasi oleh unit kerja terkait untuk memastikan apakah pelaksanaan kebijakan di lapangan sudah berjalan sesuai rencana.

## 2. Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan berfungsi sebagai instrumen dalam administrasi publik untuk membedah dan mengevaluasi efektivitas kebijakan organisasi dalam mencapai tujuannya. Cakupan analisis ini meliputi:

- Identifikasi Masalah: Proses ini menuntut tiga prinsip utama: (1) masalah didasarkan pada data akurat yang valid, (2) pengolahan data harus mengikuti kaidah ilmiah yang berlaku, dan (3) penarikan kesimpulan wajib menggunakan indikator atau tolok ukur yang logis dan objektif.
- Identifikasi Alternatif: Tahap menghimpun berbagai opsi kebijakan. Jumlah alternatif yang terlalu banyak akan meningkatkan kompleksitas data dan menghambat proses seleksi. Target dari fase ini adalah tersedianya daftar alternatif kebijakan yang siap diuji banding.
- Seleksi Alternatif: Tahap menyaring opsi terbaik untuk diajukan kepada pengambil kebijakan (*policy makers*). Pemilihan ini didasarkan pada kriteria yang rasional, meliputi penyepakatan indikator, penentuan opsi terbaik, hingga pengusulan draf final kebijakan.

### 3. Implementasi Kebijakan

Implementasi adalah fase konkret untuk mewujudkan target-target program. Keberhasilan tahap ini mensyaratkan persiapan matang, termasuk kalkulasi potensi keberhasilan, mitigasi risiko kegagalan, pemetaan hambatan dan peluang, serta penilaian kapabilitas unit pelaksana.

### 4. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan

Pengawasan (monitoring) berfokus pada peninjauan jalannya implementasi melalui observasi lapangan langsung guna mencatat capaian sementara serta mengukur efisiensi dan efektivitasnya. Sementara itu, evaluasi bertugas menganalisis hasil akhir program, mengontrol kepatuhan para pelaksana, serta mengukur dampak sosial-politik kebijakan terhadap publik di luar lingkaran pemerintahan.

#### **d. Kategori Kebijakan Publik**

Dikutip oleh Taufiqurokhman (2014), Solichin Abdul Wahab mengisyaratkan bahwa untuk memahami hakikat kebijakan publik secara mendalam sebagai suatu tindakan yang terarah, kita perlu merinci kebijakan tersebut ke dalam beberapa kategori elemen pembentuknya:

1. Tuntutan kebijakan, yakni tuntutan atau desakan yang diajukan oleh pejabat-pejabat pemerintah yang dilakukan oleh aktor-aktor lain, baik swasta maupun kalangan pemerintah itu sendiri dalam sistem politik untuk melakukan tindakan tertentu atau sebaliknya.
2. Pernyataan Kebijakan, merupakan pernyataan resmi atau penjelasan mengenai kebijakan publik tertentu.
3. Keluaran kebijakan, merupakan wujud dari kebijakan publik yang paling dapat dilihat dan dirasakan, karena menyangkut hal-hal yang senyatanya dilakukan guna merealisasikan apa yang telah digariskan dalam keputusan dan pernyataan kebijakan.
4. Keputusan kebijakan, adalah keputusan yang dibuat oleh para pejabat pemerintah yang dimaksudkan untuk memberikan arah terhadap pelaksanaan kebijakan publik.

5. Hasil akhir kebijakan, yaitu akibat atau dampak yang ditimbulkan dan benar-benar dirasakan oleh masyarakat dari penerapan suatu kebijakan.

### 2.1.2 Implementasi Kebijakan Publik

#### a. Pengertian Implementasi Kebijakan

Menurut Rulinawaty (2013), implementasi kebijakan publik pada intinya adalah kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang, baik dalam lingkup pemerintah maupun swasta, untuk mendistribusikan keluaran (*output*) dari kebijakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya kepada kelompok sasaran dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan menurut Nugroho (2021) Implementasi kebijakan publik merupakan langkah penting dalam proses pembuatan kebijakan publik, yang bertujuan untuk mengubah keputusan atau kebijakan pemerintah menjadi tindakan nyata. Implementasi kebijakan publik tidak hanya mencakup tindakan administratif tetapi juga interaksi antara pembuat kebijakan, kelompok sasaran, dan lingkungan sosial tempat kebijakan tersebut diterapkan (Akib, 2010). Keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat penting untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan.

Dalam penelitian ini, analisis implementasi kebijakan publik didasarkan pada kerangka teori yang disajikan dalam buku karya Hj. Rulinawaty, S.Sos, M.Si. Penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan publik George C. Edward III sebagai alat analisis untuk memahami implementasi Program Harapan Keluarga (PKH), yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian keluarga penerima manfaat di desa Tambakmenjangan.

#### b. Pendekatan Implementasi Kebijakan

Dalam studi implementasi kebijakan publik terdapat dua pendekatan utama, yaitu pendekatan *top-down* dan *bottom-up*.

##### 1. Pendekatan *Top-Down*

Pendekatan *top-down* memandang implementasi kebijakan sebagai proses penerapan kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah pusat dan dijalankan secara hierarkis oleh pelaksana di tingkat yang lebih rendah. Pendekatan ini menekankan pentingnya tujuan kebijakan yang jelas, peraturan pelaksana, koordinasi birokrasi, dan pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa

kebijakan diimplementasikan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Tokoh yang dikenal dalam pendekatan ini termasuk George C. Edward III, Donald Van Meter, dan Carl Van Horn.

## **2. Pendekatan *Bottom-Up***

Pendekatan *bottom-up* menganggap bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat bergantung pada aktor pelaksana di tingkat lapangan dan kelompok sasaran. Pendekatan ini menekankan pentingnya kondisi sosial dalam masyarakat, interaksi antar aktor, dan kemampuan pihak yang bertanggung jawab atas implementasi untuk beradaptasi dengan realitas lokal. Dari perspektif ini, pelaksana di lapangan memiliki peran penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

## **3. Relevansi PKH sebagai pendekatan *Top-Down***

Program Harapan Keluarga (PKH) lebih relevan dianalisis menggunakan pendekatan *Top-Down* karena merupakan kebijakan nasional yang dirancang oleh pemerintah pusat, melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor 186/HUK/2022 tentang Pelaksanaan Program Sembako dan Program Keluarga Harapan, dan diimplementasikan secara bertahap hingga ke tingkat desa. Tujuan program, mekanisme pelaksanaan, sasaran penerima manfaat, dan proses keluarnya ditentukan oleh peraturan dan pedoman teknis yang harus dijalankan oleh pelaksana daerah.

Pelaksanaan PKH mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan yang mengatur target, tujuan, dan mekanisme pelaksanaan PKH. Selain itu, proses kelulusan keluarga penerima manfaat diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Keamanan Sosial Nomor 03/3/BS.01.02/10/2020 tentang Petunjuk Teknis Graduasi Mandiri Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan. Peraturan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan, instruksi teknis, dan arah pelaksanaan PKH ditentukan oleh pemerintah pusat, sedangkan pemerintah daerah dan pembantu sosial bertugas melaksanakan kebijakan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

### c. Model-Model Implementasi kebijakan

Pada dasarnya, suatu kebijakan yang dibuat pasti mengandung tujuan untuk mewujudkan keadaan yang di inginkan. Apapun produk dari suatu kebijakan, pada akhirnya akan bermuara pada tataran bagaimana mengimplementasikan kebijakan tersebut. Agar kebijakan dapat diaktualisasikan secara efektif, diperlukan model implementasi yang berfungsi sebagai standar pedoman bagi para pelaksana. Menurut Rulinawaty (2013) menguraikan sejumlah model implementasi kebijakan publik yang dapat diterapkan guna menjamin ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan. Beberapa model tersebut meliputi:

#### 1. Model Van Meter dan Van Horn

Keberhasilan implementasi kebijakan merupakan sebuah proses linier dari keputusan politik menuju kinerja kebijakan yang sangat ditentukan oleh enam variabel yang saling berkaitan.

- 1) Ukuran dan tujuan kebijakan (*Policy Standard and Objectives*)
- 2) Sumber daya kebijakan (*Policy Resources*)
- 3) Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksanaan (*Interorganizational Communication and Enforcement Activities*)
- 4) Karakteristik agen pelaksana (*The Characteristic of the Implementing Agencies*)
- 5) Lingkungan sosial, Ekonomi dan Politik (*Economic, Social, and Political Conditions*)
- 6) Kecenderungan/disposisi pelaksana (*The Disposition of Implementors*)

Dalam perspektif Van Meter dan Van Horn yang diulas oleh Rulinawaty Kasmad, keenam variabel ini bekerja seperti sebuah sistem yang saling mengunci. Kelemahan pada salah satu variabel (misalnya komunikasi yang buruk atau penolakan dari pelaksana) akan langsung menurunkan kualitas kinerja kebijakan publik secara keseluruhan.

#### 2. Model Hoogwood dan Gun

Model ini menawarkan sebuah kerangka kerja logis di mana keberhasilan suatu kebijakan diukur dari seberapa patuh dan tertatanya seluruh elemen

organisasi birokrasi dalam mengeksekusi instruksi dari pusat. Secara spesifik, ulasan dalam buku tersebut memperlihatkan cara pandang Hogwood dan Gunn terhadap keberhasilan kebijakan yang bertumpu pada dua dimensi utama:

1) Pemetaan Penyebab Kegagalan Kebijakan

Buku tersebut menguraikan pandangan Hogwood dan Gunn bahwa sebuah kebijakan publik biasanya gagal karena dua hal:

- Non-implementation (Kebijakan memang tidak dilaksanakan oleh instansi di lapangan karena kendala tertentu).
- Unsuccessful implementation (Kebijakan sudah dijalankan sepenuhnya sesuai rencana, namun faktor luar atau teori dasarnya keliru sehingga tujuan akhir tetap tidak tercapai).

2) Penggunaan 10 Syarat Mutlak sebagai Alat Evaluasi

Rulinawati (2018), memaparkan 10 prasyarat yang diajukan oleh Hogwood dan Gunn (seperti ketersediaan sumber daya, komunikasi yang sempurna, hubungan kausalitas yang andal, hingga kepatuhan mutlak bawahan). Namun, penekanan penting dalam buku ini adalah bahwa "Implementasi Sempurna" tersebut merupakan kondisi ideal yang bersifat utopia (hampir tidak mungkin terwujud secara utuh di dunia nyata).

### 3. Model Grindle

Model Merilee S. Grindle menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh dua faktor utama:

- 1) Isi Kebijakan (*Content of Policy*): Apa yang ingin dicapai, siapa pelaksananya, siapa yang terkena dampak, serta apa manfaat dan sumber daya yang disediakan.
- 2) Konteks Implementasi (*Context of Implementation*): Bagaimana situasi di lapangan, yang mencakup kekuasaan/kepentingan aktor yang terlibat, karakteristik lembaga yang berkuasa, serta tingkat kepatuhan pelaksana.

Model Grindle memandang implementasi bukan sekadar urusan administrasi, melainkan proses politik di mana keberhasilan kebijakan ditentukan oleh keselarasan antara isi kebijakan dengan kondisi lingkungan politik/sosial di lapangan.

#### **4. Model Elmore**

Mengidentifikasi jaringan aktor yang terlibat dalam proses pelayanan dan menanyakan kepada mereka seperti tujuan, strategi, aktivitas, dan kontak-kontak yang mereka miliki, menjadi awal dari model ini. Model implementasi ini didasarkan pada jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk melaksanakan sendiri implementasi kebijakannya atau mengikut sertakan pejabat birokrat namun hanya pada tataran rendah. Maka dari itu kebijakan yang dibuat harus sesuai dengan harapan, keinginan publik yang menjadi target group atau kliennya. Kebijakan ini biasanya diprakarsai oleh masyarakat, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga nirlaba kemasyarakatan (LSM)

#### **5. Model Implementasi George C. Edward III**

Penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan publik George C. Edward III sebagai alat analisis untuk memahami implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mendorong kemandirian keluarga penerima manfaat. Rulinawati (2018) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan menurut model Edward III dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Teori ini menekankan bahwa keberhasilan maupun kegagalan implementasi kebijakan sangat bergantung pada kemampuan organisasi pelaksana dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan (Fauzan, 2024). Model Edward III dipilih karena dinilai relevan untuk menganalisis implementasi kebijakan publik secara *top-down* melalui keempat variabel tersebut.

##### **1) Komunikasi**

Komunikasi adalah proses penyampaian informasi tentang kebijakan publik kepada aktor pelaksana dan kelompok sasaran. Komunikasi yang

efektif ditandai dengan informasi yang jelas, pesan yang konsisten, dan pemahaman bersama di antara pelaksana dan penerima manfaat. Dalam Program Harapan Keluarga (PKH), komunikasi berbentuk penyebaran informasi tentang tujuan program, kewajiban keluarga penerima manfaat, dan pentingnya graduasi mandiri melalui pendampingan dan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2).

## **2) Sumber Daya**

Sumber daya merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan publik yang mencakup sumber daya manusia, informasi, pendanaan, kewenangan, serta sarana dan prasarana pendukung. Ketersediaan sumber daya yang memadai mendorong implementasi program yang optimal. Dalam kerangka Program Harapan untuk Keluarga (PKH), sumber daya berkaitan dengan jumlah dan keterampilan pekerja sosial, dukungan dari masyarakat setempat, infrastruktur pendukung, dan akses informasi bagi keluarga penerima manfaat.

## **3) Disposisi**

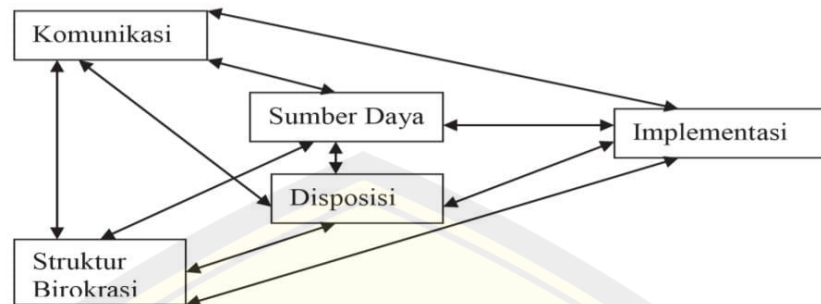
Disposisi ini mengacu pada sikap, komitmen, dan kesediaan para pelaksana kebijakan untuk menerapkan program sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pelaksana yang sangat berkomitmen dan memahami tujuan kebijakan akan lebih efektif dalam menjalankan tugasnya. Dalam implementasi Program Harapan Keluarga (PKH), disposisi ini diwujudkan melalui komitmen pendamping sosial untuk memberikan dukungan, motivasi, dan mendorong perubahan pola pikir keluarga penerima manfaat menuju kemandirian.

## **4) Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi mencakup pembagian tugas, mekanisme kerja, koordinasi, dan prosedur pelaksanaan kebijakan. Struktur birokrasi yang jelas mendorong implementasi kebijakan publik yang efektif. Dalam Program Harapan Keluarga (PKH), struktur birokrasi melibatkan koordinasi antara Kementerian Sosial, Dinas Sosial, pemerintah desa,

pendamping PKH, serta lembaga pendidikan dan kesehatan untuk mendukung pelaksanaan program dan proses graduasi mandiri.

Gambar 2. 1 Model Implementasi George C. Edward III



Sumber: Buku Karya Rulinawaty Kasmad, S.Sos., M.Si.

## 6. Relevansi Teori Edward III dengan PKH

Model implementasi kebijakan publik George C. Edward III relevan dengan penelitian ini karena Program Harapan Keluarga (PKH) merupakan kebijakan publik yang implementasinya melibatkan berbagai aktor dan dilakukan secara hierarkis dari pemerintah pusat hingga tingkat desa (Juan, 2023). Menurut Khoiriyah (2025) Keberhasilan PKH dalam mendorong graduasi mandiri menuju kemandirian tidak hanya bergantung pada keberadaan program, tetapi juga pada kualitas komunikasi antara pendamping PKH dan keluarga penerima manfaat, ketersediaan sumber daya yang diperlukan, komitmen pihak yang bertanggung jawab atas implementasi, dan koordinasi birokrasi antar lembaga pelaksana.

Melalui model Edward III, penelitian ini dapat menganalisis bagaimana implementasi PKH dijalankan di Desa Tambakmenjangan, khususnya dalam mendorong perubahan pola pikir keluarga penerima manfaat menuju kemandirian dan graduasi mandiri. Model ini digunakan sebagai alat bantu analisis dalam memahami faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat implementasi PKH di tingkat desa.

### 2.1.3 Program Keluarga Harapan (PKH)

#### a. Pengertian Program keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu kebijakan perlindungan sosial yang dijalankan pemerintah Indonesia sebagai upaya mengurangi kemiskinan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Kafera 2021). Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018, PKH didefinisikan sebagai program bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin dan rentan yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial Nasional (DTSEN) (Kemensos No. 1, 2018). Program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perluasan akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. PKH juga termasuk dalam skema bantuan sosial bersyarat atau *Conditional Cash Transfer* yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia keluarga miskin melalui pemenuhan kebutuhan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial (Khadijah, 2021). Melalui pelaksanaannya, PKH diharapkan mampu mendorong perubahan perilaku keluarga penerima manfaat agar lebih berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia serta peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan.

Pelaksanaan PKH didasarkan pada regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, salah satunya Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 186/HUK/2022 tentang Pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Regulasi ini menetapkan ketentuan mengenai sasaran program, mekanisme penyaluran bantuan, serta peran pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaannya. Dengan adanya dasar hukum yang jelas, PKH memiliki legitimasi kuat sebagian bagian dari kebijakan perlindungan sosial nasional.

#### b. Dasar Hukum Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program perlindungan sosial pemerintah dengan kerangka hukum yang menjadi acuan pelaksanaannya.

1. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

2. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 186/HUK/2022 tentang Pelaksanaan Program Keluarga Harapan.
3. Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 9/3/HK.01/1/2025 menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH).
4. Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor: 03/3/BS.01.02/10/2020 tentang Petunjuk Teknis Graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan Tahun 2020.

Kerangka hukum utama ini adalah Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Keputusan ini menetapkan tujuan program, penerima manfaat sasaran, prosedur pelaksanaan, hak dan kewajiban keluarga penerima manfaat, serta tugas-tugas pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya.

Selain itu, Pelaksanaan Program Harapan untuk Keluarga (PKH) semakin diperkuat dengan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 9/3/HK.01/1/2025, Keputusan ini menguraikan implementasi teknis dan penguatan Program Harapan untuk Keluarga guna memastikan dukungan yang efektif dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk terus beradaptasi dan memperkuat kebijakannya guna meningkatkan kualitas pelaksanaan PKH di lapangan.

Pelaksanaan graduasi keluarga penerima manfaat diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor: 03/3/BS.01.02/10/2020 tentang Petunjuk Teknis Graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan Tahun 2020. Petunjuk teknis tersebut menjadi pedoman dalam pelaksanaan proses graduasi, baik graduasi alamiah maupun graduasi mandiri, sebagai bagian dari upaya mendorong kemandirian keluarga penerima manfaat.

### **c. Tujuan dan sasaran PKH**

Tujuan Utama PKH dalam Permensos No 1, 2018 adalah mengurangi kemiskinan antargenerasi melalui peningkatan akses keluarga miskin terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, sekaligus mendorong perubahan perilaku menuju kemandirian. Selain itu, PKH bertujuan meringankan beban pengeluaran

rumah tangga miskin serta mendorong perubahan perilaku keluarga penerima manfaat agar lebih mandiri secara sosial dan ekonomi dalam jangka panjang (Hapsari, 2023).

Sasaran kepesertaan PKH merupakan keluarga atau individu miskin serta rentan yang terdaftar dalam data terpadu sosial ekonomi nasional (DTSEN) dan memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial sebagai syarat penerima program (Kepdirjen perlindungan dan Jaminan Sosial No. 9/3/HK.01/1/2025).

#### **d. Kriteria Penerima PKH**

Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki beberapa kriteria penerima PKH yang di sesuaikan dengan kondisi anggota keluarga penerima manfaat. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, terdapat 3 kriteria komponen penerima bantuan sosial PKH adalah sebagai berikut:tersebut mencakup tiga bidang utama:

1. Bidang pendidikan
  - a. Anak Sekolah Dasar atau sederajat
  - b. Anak Sekolah Menengah Pertama atau sederajat
  - c. Anak Sekolah Menengah Atas atau sederajat
  - d. Anak usia 6 – 12 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun
2. Bidang Kesehatan
  - a. Ibu Hamil/menyusui
  - b. Anakberusia 0 sampai dengan 6 tahun
3. Bidang Kesejahteraan sosial
  - a. Lanjut usia mulai 70 tahun
  - b. Penyandang disabilitas, diutamakan penyandang disabilitas berat

Ketiga kriteria komponen tersebut dirancang untuk memperkuat modal manusia (*human capital*) dan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan generasi penerus.

### e. Besaran Bantuan PKH

Selain memperoleh pendampingan melalui P2K2, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH juga memperoleh bantuan tunai bersyarat (*conditional cash transfer*) yang besarnya dihitung berdasarkan jumlah dan jenis komponen yang dimiliki oleh keluarga tersebut. Satu keluarga dapat memiliki lebih dari satu komponen sekaligus, misalnya ibu hamil yang juga memiliki anak usia sekolah, sehingga total bantuan yang diterima setiap KPM dapat berbeda-beda sesuai komponen yang dipenuhi, dengan pembatasan maksimal empat komponen dalam satu Kartu Keluarga. Bantuan disalurkan secara non-tunai setiap tiga bulan sekali (empat tahap dalam satu tahun) melalui rekening bank yang ditunjuk pemerintah.

Tabel 2.1 Indeks Bantuan PKH per Komponen

| No | Bidang               | Komponen                       | Bantuan Per Tahap (Rp) | Bantuan Per Tahun (Rp) |
|----|----------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1. | Pendidikan           | Anak SD/ sederajat             | 225.000                | 900.000                |
|    |                      | Anak SMP/ sederajat            | 375.000                | 1.500.00               |
|    |                      | Anak SMA/ sederajat            | 500.000                | 2.000.000              |
| 2. | Kesehatan            | Ibu hamil/ nifas               | 750.000                | 3.000.000              |
|    |                      | Anak usia dini (0-6 tahun)     | 750.000                | 3.000.000              |
| 3. | Kesejahteraan Sosial | Lanjut usia (70 tahun ke atas) | 600.000                | 2.400.000              |
|    |                      | Penyandang disabilitas berat   | 600.000                | 2.400.000              |

Sumber: Kementerian Sosial RI, diolah dari Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 dan pemutakhiran indeks bantuan PKH

Berdasarkan Tabel di atas, dapat dipahami bahwa manfaat yang diterima KPM bersifat kumulatif sesuai jumlah komponen yang dimiliki keluarganya, sehingga nominal bantuan yang diterima antar-KPM dapat berbeda meskipun sama-sama terdaftar sebagai peserta PKH. Selain bantuan tunai, KPM juga memperoleh manfaat non-tunai berupa pendampingan sosial, edukasi keluarga melalui P2K2, serta akses prioritas terhadap program pemberdayaan ekonomi yang diselenggarakan pemerintah daerah.

#### **f. Mekanisme Pelaksanaan PKH**

Mekanisme pelaksanaan PKH dilaksanakan dengan beberapa tahapan (Permensos No. 1 Tahun 2018):

1. Perencanaan
2. Penetapan calon peserta PKH
3. Validasi data calon penerima manfaat PKH
4. Penentuan Keluarga Penerima Manfaat PKH
5. penyaluran Bantuan Sosial PKH
6. pendampingan PKH
7. Peningkatan Kemampuan Keluarga
8. Verifikasi komitmen Keluarga Penerima Manfaat PKH
9. Pemutakhiran Data Keluarga Penerima Manfaat PKH
10. Transformasi Kepesertaan PKH

Menurut (Kepdirjen perlindungan dan Jaminan Sosial No. 9/3/HK.01/1/2025) Penetapan KPM dilakukan berdasarkan data DTSEN yang diverifikasi melalui validasi lapangan, Penyaluran bantuan dilaksanakan secara non-tunai melalui rekening bank yang ditunjuk pemerintah sebagai bagian dari kebijakan digitalisasi bantuan sosial atau pos penyalur yang diperuntukkan bagi lanjut usia terlanjar potensial, penyandang disabilitas berat dan daerah yang belum memiliki infrastruktur untuk mendukung penyaluran bantuan sosial non tunai. Mekanisme ini bertujuan meningkatkan akurasi, transparansi, dan akuntabilitas penyaluran bantuan.

#### **g. Pendamping Sosial**

Pendamping sosial PKH memiliki peran strategis dalam implementasi program di tingkat lapangan. Pendamping sosial bertugas mendampingi keluarga penerima manfaat (KPM) agar memahami tujuan program. Dalam konteks implementasi kebijakan, pendamping sosial tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana administratif, tetapi juga sebagai fasilitator, motivasi, dan agen perubahan yang menjembatani kebijakan PKH dengan praktik pelaksanaannya di tingkat keluarga dan masyarakat desa (Silviana & Chilmy, 2024). Pendamping PKH melakukan berbagai kegiatan seperti verifikasi data validitas data, pemantauan

kepatuhan KPM terhadap komponen pendidikan dan kesehatan, fasilitas pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2), serta memberikan edukasi mengenai pentingnya graduasi mandiri (Hapsari *at.al.*, 2023).

Peran pendamping sosial sangat penting dalam membangun komunikasi yang efektif antara pemerintah dan keluarga penerima manfaat. Melalui proses pendampingan, pendamping sosial diharapkan dapat meningkatkan kesadaran, memotivasi, dan mengubah pola pikir KPM

untuk mengurangi ketergantungan mereka pada bantuan sosial. Oleh karena itu, kualitas dan intensitas pendampingan merupakan faktor kunci keberhasilan Program Harapan untuk Keluarga (PKH)

#### **h. Indikator Keberhasilan PKH**

Keberhasilan PKH dapat diukur melalui sejumlah indikator operasional sebagaimana ditetapkan dalam Permensos No. 1 Tahun 2018 dan petunjuk teknis PKH Kemensos No. 9/3/HK.01/1/2025. Indikator tersebut mencakup: (1) tingkat kepatuhan KPM terhadap kewajiban pendidikan dan kesehatan, seperti kehadiran anak di sekolah atau pemeriksaan ibu hamil di fasilitas kesehatan, (2) tingkat partisipasi dalam kegiatan sosial dan *Family Development Session*, serta (3) tingkat graduasi, yaitu keluarnya keluarga dari kepesertaan PKH karena telah mengalami peningkatan kesejahteraan ekonomi.

### **2.1.4 Graduasi Mandiri**

#### **a. Pengertian Graduasi Mandiri**

Menurut Riztiana & Handoyo (2021) Graduasi mandiri merupakan konsep yang digunakan dalam PKH untuk menggambarkan kondisi ketika keluarga penerima manfaat tidak lagi bergantung pada bantuan sosial dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Graduasi mandiri terjadi ketika keluarga penerima manfaat keluar dari kepesertaan PKH secara sadar dan sukarela karena telah mengalami peningkatan kesejahteraan dan kapasitas ekonomi .

Dalam konteks PKH, graduasi mandiri tidak hanya dipahami sebagai berhentinya bantuan sosial, tetapi juga sebagai proses perubahan sosial dan ekonomi keluarga penerima manfaat menuju kemandirian (Khabibi, 2024). Oleh

karena itu, graduasi mandiri menjadi indikator penting keberhasilan implementasi PKH dalam upaya pengentasan kemiskinan.

#### **b. Jenis Graduasi dalam program Keluarga Harapan**

Dalam Program Keluarga Harapan (PKH), Graduasi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu graduasi alamiah dan graduasi mandiri (Khabibi, 2024).

##### **1. Graduasi Alamiah**

Graduasi alamiah terjadi ketika keluarga penerima manfaat tidak lagi memenuhi syarat kepesertaan PKH karena komponen yang dimiliki sudah tidak terpenuhi. Misalnya, anak telah menyelesaikan pendidikan, tidak terdapat lagi ibu hamil atau balita, maupun perubahan kondisi lainnya yang menyebabkan keluarga keluar dari kepesertaan program secara administratif.

##### **2. Graduasi Mandiri**

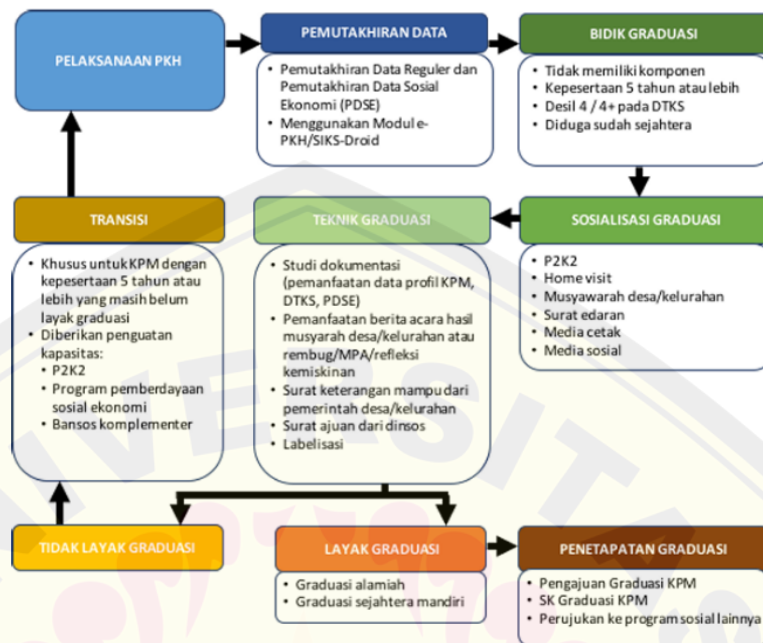
Graduasi mandiri merupakan kondisi ketika keluarga penerima manfaat secara sukarela mengundurkan diri dari kepesertaan PKH karena merasa telah mampu secara ekonomi dan sosial. Graduasi mandiri mencerminkan keberhasilan program dalam mendorong perubahan pola pikir, peningkatan kesejahteraan, serta kemandirian keluarga penerima manfaat.

Dalam penelitian ini, fokus utama penelitian diarahkan pada graduasi mandiri karena dianggap lebih mencerminkan keberhasilan implementasi PKH dalam membangun kemandirian keluarga miskin.

### c. Alur Graduasi

Berikut alur proses graduasi KPM PKH:

Gambar 2. 2 Alur proses Graduasi PKH



Sumber: Kepdirjen Perlindungan dan Jaminan sosial, No: 03/3/BS.02.01/10/2020

### d. Faktor Pendorong Graduasi Mandiri

Menurut Andini *at.al* (2024) Keberhasilan graduasi mandiri bergantung pada beberapa faktor yang saling berkaitan, baik di dalam keluarga penerima manfaat maupun dari pelaksanaan program itu sendiri, berikut beberapa faktor pendorong keberhasilan graduasi mandiri:

1. Peningkatan situasi ekonomi keluarga melalui pekerjaan atau usaha baru yang menghasilkan pendapatan stabil untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari
2. Perubahan pola pikir dan motivasi tinggi KPM untuk berkembang dan keluar dari ketergantungan bantuan sosial
3. Dukungan sosial dari lingkungan sekitar yang membantu memperkuat posisi keluarga di masyarakat
4. Kualitas dukungan pendamping sosial PKH dalam mengawal dan mengarahkan proses kemandirian keluarga

5. Komunikasi dan edukasi lewat P2K2 (Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga) untuk menanamkan pemahaman bahwa bantuan PKH bersifat sementara dan mendorong kemandirian.

#### e. Peran Pendamping dalam Proses Menuju Graduasi Mandiri

Menurut Awalyah (2025) Pendamping sosial program PKH memiliki peran penting dalam mendorong keluarga penerima manfaat untuk menjadi mandiri. Pendamping tidak hanya bertugas melakukan pengumpulan data dan pengawasan administratif, tetapi mereka juga berperan sebagai fasilitator, motivator, dan agen perubahan sosial bagi keluarga penerima manfaat (Awalyah, 2025). Melalui pendampingan, pendamping PKH memberi edukasi tentang tujuan program PKH, pentingnya kemandirian, pengelolaan keuangan keluarga, dan penggunaan bantuan yang diterima secara optimal.

Selain itu, pendamping sosial memimpin pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2), yang berfungsi sebagai platform pembelajaran dan alat untuk perubahan perilaku bagi keluarga penerima manfaat (Gunawan et al., 2024). Keberhasilan graduasi mandiri dipengaruhi oleh kualitas komunikasi, intensitas pendampingan, dan kemampuan pendamping untuk memotivasi dan meningkatkan kesadaran di antara keluarga penerima manfaat tentang kehidupan yang lebih mandiri.

### 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah referensi penelitian yang diambil dari karya tulis ilmiah. Penelitian terdahulu digunakan untuk menambah informasi. Referensi dari penelitian terdahulu akan memberikan kontribusi kepada peneliti sebagai sumber rujukan sebelum melakukan penelitian yang selanjutnya digunakan sebagai pertimbangan sebelum menentukan metode penelitian.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

| No. | Nama Penelitian<br>(Tahun)    | Judul                                                        | Jenis<br>Penelitian | Hasil                                                                    |
|-----|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Oktaviani &<br>Susetyo (2021) | Implementasi<br>Program Keluarga<br>Harapan Sebagai<br>Upaya | Kualitatif          | Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Keluarga Harapan |

| No. | Nama Penelitian<br>(Tahun)                                                                        | Judul                                                                                                                      | Jenis<br>Penelitian | Hasil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                   | Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Latugho                                                                      |                     | (PKH) di Desa Latugho telah berjalan cukup baik dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan dan kesehatan. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena masih terdapat kendala dalam ketepatan sasaran, pemahaman penerima manfaat, serta pendampingan program. |
| 2.  | Syahputra & Sukmana (2024)                                                                        | Pengentasan Kemiskinan Melalui Graduasi Sejahtera Mandiri Program Keluarga Harapan (PKH) di Indonesia: Tinjauan Sistematis | Kualitatif          | PKH penting untuk kesejahteraan tetapi masih banyak tantangan seperti ketergantungan ekonomi, akses layanan terbatas, modal sosial penting                                                                                                                                                                                   |
| 3.  | Afwa Khoiriyah, Susistifaragus, Ryan Rizky, Vika Kartika, Iftinah Helmy & Ellies Sukmawati (2025) | Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Graduasi Mandiri Keluarga Penerima Manfaat          | Kualitatif          | Pelaksanaan PKH di lokasi studi secara umum sudah berjalan baik dan memberikan dampak positif, tetapi belum optimal mendorong graduasi mandiri keluarga penerima manfaat karena masih terdapat kendala dalam pemahaman peserta, sarana/prasarana, koordinasi pelaksanaan, serta kemampuan ekonomi yang belum memadai.        |

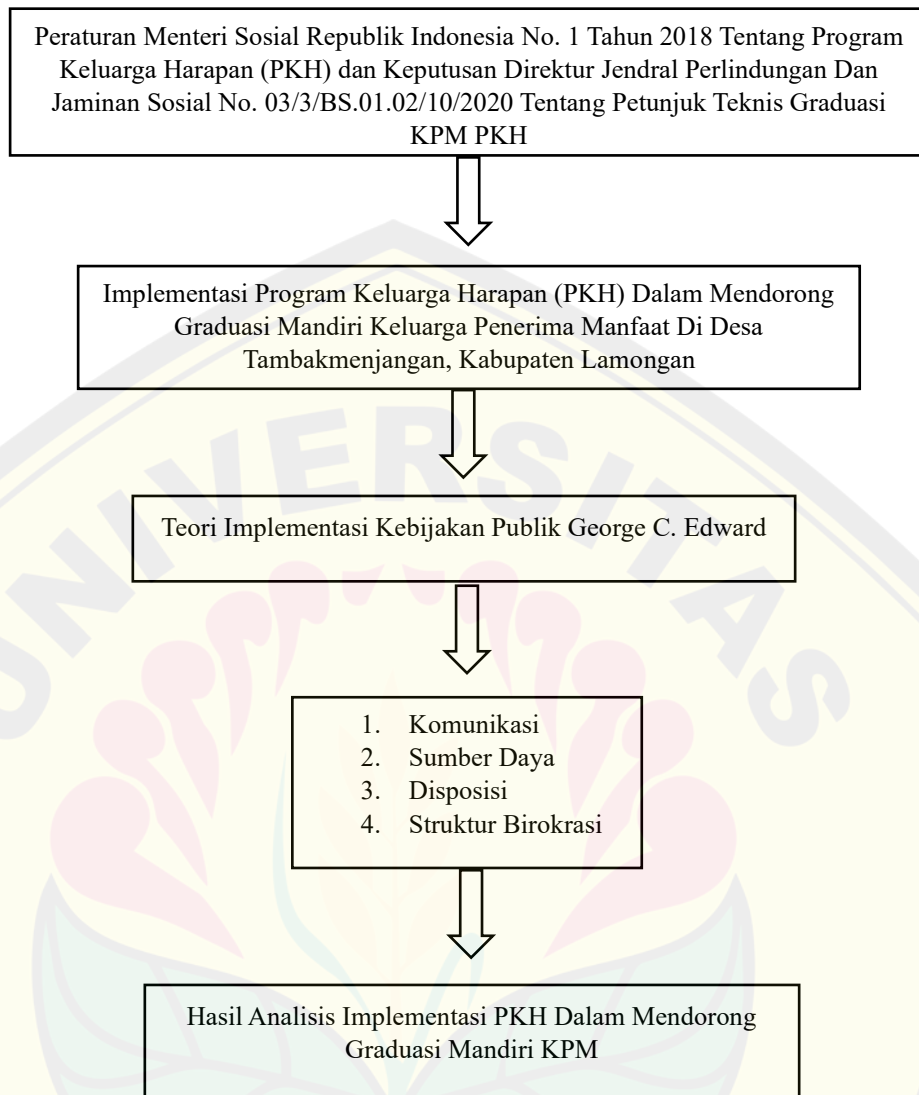
Berdasarkan penelitian terdahulu, kajian mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) umumnya masih menitikberatkan pada pelaksanaan program dan

dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga penerima manfaat. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa PKH telah berkontribusi dalam meningkatkan akses pendidikan dan layanan kesehatan bagi keluarga miskin. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji bagaimana proses implementasi PKH mampu mendorong tercapainya graduasi mandiri masih relatif terbatas, terutama pada tingkat desa. Selain itu, sebagian penelitian masih menunjukkan bahwa capaian graduasi mandiri belum berjalan optimal karena masih terdapat keluarga penerima manfaat yang bergantung pada bantuan sosial. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan untuk melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai implementasi Program Keluarga Harapan dalam mendorong graduasi mandiri keluarga penerima manfaat, khususnya pada konteks lokal di Desa Tambakmenjangan, Kabupaten Lamongan, sehingga penelitian ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan penelitian tersebut.

## **2.2 Kerangka Pikir**

Berdasarkan dengan pembahasan sebelumnya yang telah dipaparkan di tinjauan pustaka, untuk melengkapi kerangka pikir dalam penelitian ini, penulis berpedoman pada teori yang di kemukakan oleh George C. Edward III mengenai implementasi kebijakan. Dalam teori tersebut dijelaskan bahwa dalam mengimplementasikan suatu kebijakan publik kita harus memperhatikan 4 variabel penting yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi yang memiliki indikator masing-masing di mana semuanya saling mempengaruhi antara satu sama lain dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi.

Gambar 2. 3 Kerangka Pikir



### **BAB 3. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif adalah strategi penelitian yang di dalamnya peneliti menyelidiki kejadian, fenomena kehidupan dan meminta individu atau sekelompok individu untuk menceritakan kehidupan mereka. Informan tersebut kemudian diceritakan kembali oleh peneliti dalam kronologi deskriptif (Adhi et al., 2019).

#### **3.2 Penentuan Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian menurut Sujarweni, (2014) adalah tempat dimana penelitian dilakukan, penelitian tersebut dilakukan di Desa Tambakmenjangan, Kecamatan Sarirejo, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Pertimbangan peneliti memilih lokasi ini karena desa tersebut merupakan salah satu wilayah pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) dan memiliki keluarga penerima manfaat yang telah maupun sedang menuju proses graduasi mandiri. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April sampai dengan Juli 2026, yang meliputi kegiatan persiapan, pengumpulan data, pengolahan data, hingga penyusunan hasil penelitian.

#### **3.3 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian menurut Moleong, (2016), bertujuan untuk menyempitkan ruang lingkup penelitian kualitatif serta memandu pemilihan data yang relevan dan tidak relevan. Penetapan fokus dalam penelitian kualitatif didasarkan pada konteks sosial secara menyeluruh yang sedang dipelajari, mencakup elemen lokasi (place), aktor (actor), dan kegiatan (activity) yang saling berinteraksi secara harmonis, hal ini karena sifat fokus penelitian kualitatif yang holistik (komprehensif, tidak terpisahkan) (Sugiyono, 2016).

Fokus Penelitian ini adalah implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mendorong graduasi mandiri keluarga penerima manfaat: Fokus penelitian ini adalah implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di tingkat desa

berdasarkan faktor-faktor implementasi kebijakan yang dianalisis dalam kaitannya dengan proses serta indikator keberhasilan graduasi mandiri keluarga penerima manfaat.

### 3.4 Penentuan Informan Penelitian

Menurut Asrulla et al., (2023), informan adalah peserta dalam konteks penelitian yang bertugas memberikan wawasan tentang keadaan dan situasi yang terjadi. Informan memiliki fungsi krusial dalam penelitian kualitatif, di mana mereka menjadi elemen utama untuk mengekstrak data dan menyediakan informasi yang diperlukan.

Penentuan Informan dalam penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Informan dipilih karena dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan seperti, pendamping PKH, keluarga penerima manfaat dan pemerintah desa, informan yang terpilih terdiri dari:

Tabel 3. 1 Informan Penelitian

| No. | Nama       | Jabatan                   | Sasaran Data                                                                                                                                                           |
|-----|------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Bapak Dani | Koordinator PKH Kabupaten | Informasi mengenai kebijakan, pelaksanaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH), serta mekanisme Graduasi Mandiri di Kabupaten Lamongan. |
| 2.  | Bapak Rudi | Pendamping PKH            | Informasi mengenai pelaksanaan PKH di lapangan, proses pendampingan KPM, P2K2, verifikasi komitmen, pemutakhiran data, serta kendala dalam mendorong Graduasi Mandiri. |
| 3.  | Bapak Aziz | Kepala Desa               | Informasi mengenai peran pemerintah desa dalam pelaksanaan PKH, koordinasi dengan pendamping PKH, kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta dukungan                    |

| No. | Nama            | Jabatan | Sasaran Data                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|-----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                 |         | desa terhadap Graduasi Mandiri KPM.                                                                                                                                                                                               |
| 4.  | Ibu Nur Hasanah | KPM PKH | KPM penerima PKH sejak tahun 2017 ( $\pm 9$ tahun), informasi mengenai pengalaman menerima bantuan dalam jangka panjang, perubahan pola pikir, pemanfaatan bantuan, dan faktor yang memengaruhi belum melakukan Graduasi Mandiri. |
| 5.  | Ibu Fitha       | KPM PKH | KPM penerima PKH sejak tahun 2025 ( $\pm 1$ tahun), informasi mengenai pengalaman sebagai penerima baru, pelaksanaan P2K2, serta peran sebagai ketua kelompok dalam mendampingi dan mengoordinasikan anggota PKH.                 |
| 6.  | Ibu Lia         | KPM PKH | KPM penerima PKH sejak tahun 2026; informasi mengenai proses menjadi penerima PKH, pemahaman terhadap tujuan program, serta harapan dan perubahan yang dirasakan setelah menerima bantuan.                                        |
| 7.  | Ibu Tani        | KPM PKH | Informasi mengenai proses dan faktor yang mendorong keberhasilan Graduasi Mandiri, perubahan kondisi ekonomi, perubahan pola pikir, serta pengalaman selama mengikuti PKH.                                                        |

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2014) adalah tahap paling krusial dalam sebuah penelitian, sebab inti dari penelitian adalah memperoleh data. Teknik ini melibatkan pendekatan atau metode yang diterapkan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi yang akurat dari subjek penelitian, serta bagaimana peneliti memilih teknik yang sesuai untuk mendapatkan data dan kemudian menyimpulkan hasilnya. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara Menurut (Sugiyono, 2018) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara dan informan. Teknik ini digunakan untuk menggali informasi secara mendalam terkait implementasi PKH dan proses graduasi mandiri.

2. Observasi

Observasi menurut Menurut Sugiyono (2018), observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik dibandingkan dengan teknik lainnya, karena observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain.

3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan sebagai pelengkap data. Menurut Sugiyono (2018), metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip, laporan, dan dokumen resmi yang relevan dengan penelitian.

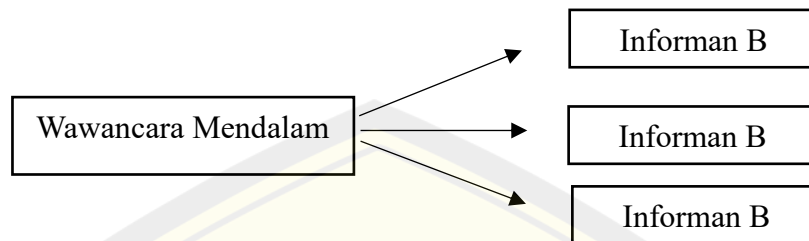
### **3.6 Keabsahan Data**

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif sangat penting untuk menjamin validitas hasil penelitian. Menurut (Anggito & Setiawan, 2018), keabsahan data bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar mencerminkan kenyataan di lapangan. Untuk itu, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Menurut (Sugiyono, 2022) triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik dan sumber data yang telah ada. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi triangulasi sumber dan triangulasi teknik, yaitu dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

- a. Triangulasi Sumber

dilakukan untuk menguji kredibilitas data dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari beberapa informan atau sumber yang berbeda menggunakan teknik pengumpulan data yang sama. Proses ini bertujuan untuk meminimalkan potensi bias yang muncul apabila data hanya berasal dari satu sudut pandang

gambar 3. 1 Triangulasi Sumber

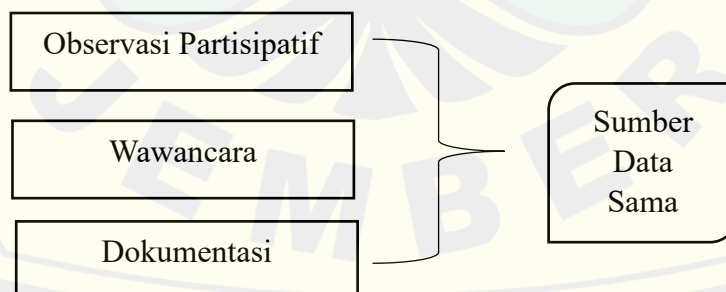


Sumber: Anggito (2018)

## b. Triangulasi Teknik

merupakan upaya menguji kredibilitas data dengan menerapkan berbagai teknik pengumpulan data terhadap sumber yang sama. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara, dan dokumentasi secara terpadu untuk memperoleh data dari sumber yang sama (Anggito & Setiawan, 2018). Data yang diperoleh melalui wawancara selanjutnya dibandingkan dengan hasil observasi maupun dokumentasi. Apabila ditemukan perbedaan informasi, peneliti melakukan klarifikasi atau diskusi lanjutan dengan sumber data untuk memastikan keabsahan data. Perbedaan tersebut dapat terjadi karena masing-masing sumber memiliki sudut pandang yang berbeda terhadap fenomena yang diteliti.

gambar 3. 2 Triangulasi Teknik



Sumber: Anggito (2018)

### 3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan penyortiran data ke dalam kategori, pola, dan satuan uraian dasar sehingga memungkinkan indentifikasi tema dan perumusan hipotesis kerja yang didukung oleh data (Haryoko *et al.*, 2020). Menurut Anggito (2018), analisis data kualitatif merupakan proses yang berlangsung secara interaktif dan berkesinambungan sampai data mencapai titik jenuh. Analisis data bertujuan untuk menemukan pola, tema, dan makna dari data yang diperoleh di lapangan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, serta transformasi data mentah yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Menurut (Qomaruddin *et al.*, 2024), reduksi data dilakukan untuk mempertajam, menggolongkan, dan mengarahkan data agar sesuai dengan fokus penelitian. Pada tahap ini, peneliti menyeleksi data yang relevan dengan implementasi PKH, dan proses graduasi mandiri.

2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan menyusun data hasil reduksi dalam bentuk narasi deskriptif, matriks, atau tabel tematik. Menurut Sugiyono (2018), penyajian data bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam memahami fenomena yang diteliti dan melihat hubungan antar kategori data. Penyajian data dalam penelitian ini difokuskan pada gambaran implementasi PKH, respons keluarga penerima manfaat, serta dinamika menuju graduasi mandiri.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir analisis data yang dilakukan secara bertahap selama proses penelitian. Menurut Qomaruddin *et.al.*, (2024), kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan diverifikasi dengan data tambahan hingga diperoleh kesimpulan yang kredibel. Pada tahap ini, peneliti menafsirkan makna data untuk menjawab fokus penelitian dan menarik kesimpulan mengenai peran implementasi PKH dalam mendorong graduasi mandiri.

## BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian mengenai Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mendorong graduasi mandiri Keluarga Penerima Manfaat di Desa Tambakmenjangan, Kecamatan Sarirejo, Kabupaten Lamongan. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan PKH, yaitu pendamping sosial PKH, pemerintah desa, serta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

### 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Tambakmenjangan merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Sarirejo, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Desa ini merupakan desa terluas di Kecamatan Sarirejo dengan luas wilayah sekitar 492,23 hektare. Secara administratif, Desa Tambakmenjangan terdiri atas empat dusun dengan jarak antardusun yang relatif berjauhan. Kondisi geografis tersebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pelaksanaan berbagai program pemerintah di tingkat desa, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), terutama dalam proses pendampingan dan pelaksanaan kegiatan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Gambar 4. 1 Balai Desa Tambakmenjangan



Sumber: Dokumentasi Penelitian Oleh Peneliti

Sebagai wilayah agraris, sebagian besar masyarakat Desa Tambakmenjangan bekerja di sektor pertanian, buruh harian lepas, dan buruh pabrik. Mata pencaharian

tersebut umumnya memiliki tingkat pendapatan yang tidak tetap sehingga masih terdapat keluarga yang tergolong rentan secara ekonomi dan menjadi sasaran Program Keluarga Harapan (PKH).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Sosial Kabupaten Lamongan, jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan di Desa Tambakmenjangan mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Perubahan jumlah KPM tersebut dipengaruhi oleh proses pemutakhiran data, perubahan status sosial ekonomi keluarga, serta mekanisme kepesertaan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Tabel 4. 1 Data Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Tambakmenjangan 2023-2026

| Tahun | Jumlah KPM | Graduasi Mandiri |
|-------|------------|------------------|
| 2023  | 83         | 0                |
| 2024  | 134        | 0                |
| 2025  | 147        | 0                |
| 2026  | 124        | 1                |

Sumber: Dinas Sosial Lamongan (2026)

Berdasarkan Tabel di atas, jumlah KPM di Desa Tambakmenjangan mengalami peningkatan dari 83 KPM pada tahun 2023 menjadi 147 KPM pada tahun 2025, kemudian menurun menjadi 124 KPM pada tahun 2026. Sementara itu, graduasi mandiri baru tercatat sebanyak satu KPM pada tahun 2026. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah keluarga yang berhasil keluar dari kepesertaan PKH melalui mekanisme graduasi mandiri masih sangat terbatas dibandingkan dengan jumlah keseluruhan KPM yang menerima bantuan.

Penurunan jumlah KPM dari 147 pada tahun 2025 menjadi 124 pada tahun 2026 tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh keberhasilan graduasi mandiri, mengingat pada periode yang sama baru satu KPM yang tercatat melakukan graduasi mandiri. Penurunan tersebut juga dipengaruhi oleh mekanisme graduasi alamiah serta dilakukan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) oleh pendamping PKH dan di verifikasi pemerintah pusat. Graduasi alamiah terjadi ketika KPM tidak lagi memenuhi komponen kepesertaan, misalnya anak yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan SMA/ sederajat, ibu yang telah

melewati masa nifas, maupun anggota keluarga lain yang komponennya telah berakhir sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, pemutakhiran DTSEN turut memengaruhi status kepesertaan, di antaranya melalui penyesuaian klasifikasi desil kesejahteraan, koreksi data ganda atau tidak akurat, serta perubahan kondisi kependudukan keluarga seperti kepindahan domisili atau meninggalnya anggota keluarga.

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Tambakmenjangan didampingi oleh seorang pendamping sosial yang bertanggung jawab terhadap tiga desa dampingan, yaitu Desa Tambakmenjangan dan dua desa lainnya. Dalam menjalankan tugasnya, pendamping melaksanakan kegiatan pendampingan secara rutin melalui Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) yang dilaksanakan satu kali setiap bulan. Lokasi pelaksanaan P2K2 disesuaikan dengan kesepakatan kelompok, baik di balai desa maupun di rumah warga.

Informan dalam penelitian ini terdiri atas Koordinator kabupaten, pendamping sosial PKH yang bertugas melaksanakan pendampingan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), pemerintah desa yang berperan dalam mendukung pelaksanaan program melalui koordinasi dan pemutakhiran data, serta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagai penerima bantuan sekaligus sasaran utama implementasi program. Ketiga kelompok informan tersebut dipilih untuk memperoleh informasi dari berbagai sudut pandang sehingga data yang diperoleh dapat menggambarkan secara komprehensif pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Tambakmenjangan.

Tabel 4. 2 Data Informan

| No | Identitas                        | Jumlah Orang |
|----|----------------------------------|--------------|
| 1  | Koordinator Kabupaten : Pak Rudi | 1            |
| 2  | Pendamping PKH : Pak Rudi        | 1            |
| 3  | Kepala Desa : Pak Aziz           | 1            |
| 4  | KPM : Bu Nur Hasanah             | 1            |
| 5  | KPM : Bu Fitha                   | 1            |
| 6  | KPM : Bu Lia                     | 1            |
| 7  | KPM : Bu Tani                    | 1            |

Sumber: Diolah Peneliti

Selain melaksanakan P2K2, pendamping juga berkoordinasi secara berkala dengan pemerintah desa dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Koordinasi tersebut meliputi pemutakhiran data KPM, verifikasi kondisi keluarga di lapangan, serta pembahasan mengenai KPM yang dinilai telah memenuhi kriteria untuk melakukan graduasi. Gambaran mengenai kondisi wilayah, karakteristik masyarakat, dan pelaksanaan PKH di Desa Tambakmenjangan tersebut menjadi dasar dalam memahami implementasi Program Keluarga Harapan dalam mendorong graduasi mandiri yang selanjutnya akan dibahas pada bagian hasil penelitian.

## **4.2 Hasil Penelitian**

Bagian ini menyajikan data hasil penelitian secara deskriptif mengenai proses implementasi PKH di Desa Tambakmenjangan, mencakup: landasan regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan, aktor yang terlibat beserta peran masing-masing, mekanisme kerja dan pelaksanaan program di tingkat desa, tahapan pelaksanaan graduasi mandiri, serta dinamika respons keluarga penerima manfaat terhadap proses graduasi. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi.

### **4.2.1 Landasan Regulasi Pelaksanaan PKH dan Graduasi Mandiri**

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tambakmenjangan berpijak pada dua regulasi utama yang menjadi kerangka normatif program. Pertama, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan. Regulasi ini mengatur secara menyeluruh mengenai tujuan, sasaran, besaran bantuan, kewajiban KPM, mekanisme penyaluran, serta peran pendamping sosial dalam pelaksanaan PKH. Dalam Permensos tersebut ditegaskan bahwa PKH bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan, sekaligus mendorong perubahan perilaku dan kemandirian penerima manfaat. Tujuan jangka panjang PKH adalah tercapainya graduasi, yakni kondisi di mana KPM tidak lagi memerlukan bantuan sosial karena telah mampu secara ekonomi.

Kedua, Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 03/3/BS.01.02/10/2020 Tentang Petunjuk Teknis Graduasi KPM PKH. Regulasi ini secara spesifik mengatur mekanisme, kriteria, dan prosedur graduasi KPM PKH. Berdasarkan petunjuk teknis tersebut, graduasi dibedakan menjadi dua jenis: (1) graduasi alamiah, yaitu graduasi yang terjadi karena KPM tidak lagi memenuhi komponen kepesertaan (2) graduasi sejahtera mandiri, yaitu graduasi yang terjadi karena kondisi sosial-ekonomi KPM telah meningkat secara signifikan sehingga dinilai mampu hidup mandiri tanpa bantuan. Petunjuk teknis ini pula yang menjadi dasar prosedur identifikasi, verifikasi, dan penghapusan data KPM dari sistem informasi PKH yang dilaksanakan oleh pendamping sosial di lapangan.

Tabel 4.3 Landasan Regulasi Pelaksanaan PKH dan Graduasi Mandiri

| NO | Regulasi                                                                                                     | Pokok Pengaturan                                                                                                                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Permensos RI No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan                                               | Tujuan, sasaran, besaran bantuan, kewajiban KPM, mekanisme penyaluran, dan peran pendamping sosial PKH                             |
| 2  | Kepdirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial No. 03/3/BS.01.02/10/2020 tentang Petunjuk Teknis Graduasi KPM PKH | Mekanisme, kriteria, jenis graduasi (alamiah, sejahtera mandiri, force majeure), dan prosedur penghapusan data KPM dari sistem PKH |

Sumber: Kementerian Sosial RI

Kedua regulasi tersebut menjadi pedoman bagi seluruh aktor yang terlibat dalam implementasi PKH di Desa Tambakmenjangan, mulai dari Dinas Sosial Kabupaten Lamongan, pendamping sosial, hingga pemerintah desa. Dalam praktiknya, pemahaman terhadap regulasi ini tidak selalu merata di antara para pelaksana dan penerima manfaat, sehingga memengaruhi kualitas implementasi program secara keseluruhan. Kondisi tersebut akan dianalisis lebih lanjut dalam pembahasan menggunakan model implementasi George C. Edward III.

#### 4.2.2 Aktor dan Pembagian Peran dalam Implementasi PKH

Program Keluarga Harapan melibatkan beberapa aktor pelaksana yang bekerja secara berjenjang sesuai struktur yang ditetapkan Kementerian Sosial RI. Berikut Implementor dan peran masing-masing berdasarkan hasil penelitian.

##### a. Kementerian Sosial Republik Indonesia

Kementerian Sosial RI berperan sebagai pembuat kebijakan dan pengelola program di tingkat nasional. Kemensos menetapkan regulasi, pedoman teknis, besaran bantuan, kriteria kepesertaan, serta petunjuk teknis graduasi. Dalam konteks Desa Tambakmenjangan, seluruh ketentuan program berasal dari tingkat pusat dan diturunkan secara hierarkis ke daerah.

##### b. Dinas Sosial Kabupaten Lamongan

Dinas Sosial Kabupaten Lamongan melaksanakan fungsi koordinasi, monitoring, pembinaan, dan evaluasi pelaksanaan PKH di tingkat kabupaten. Sebagaimana disampaikan oleh narasumber dari Dinas Sosial

"...Peran dinas sosial lebih ke fungsi koordinasi, pembinaan, dan evaluasi. Pelaksanaannya di lapangan dilakukan oleh pendamping PKH yang berkoordinasi dengan pemerintah desa. Dinas sosial memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan, memberikan pembinaan kepada pendamping apabila terdapat kendala di lapangan, serta memfasilitasi penyelesaian berbagai permasalahan yang muncul saat pelaksanaan program..."(Hasil wawancara dengan Koordinator Kabupaten Pak Dani pada 9 April 2026)

Dinas Sosial memiliki koordinator kabupaten yang menjembatani antara kebijakan pusat dan pelaksanaan lapangan. Terkait ketersediaan sumber daya, Dinas Sosial menyatakan:

"...Untuk sumber daya manusia, kami memiliki koordinator kabupaten, pendamping sosial, serta dukungan dari pemerintah desa. Anggaran bantuan PKH sendiri berasal dari pemerintah pusat, sedangkan Dinas Sosial lebih berperan dalam aspek koordinasi dan pembinaan..."(Hasil wawancara dengan Koordinator Kabupaten Pak Dani pada 9 April 2026)

### c. Pendamping Sosial

Pendamping sosial PKH merupakan ujung tombak pelaksanaan program di tingkat lapangan. Pak Rudi, pendamping yang menangani Desa Tambakmenjangan, juga merangkap mendampingi dua desa lain, yakni Desa Gempoltumloko (95 KPM) dan Desa Sarirejo (65 KPM). Dengan total 284 KPM yang ditangani, beban kerja pendamping tergolong cukup besar. Tugas pendamping PKH mencakup: verifikasi dan pemutakhiran data KPM, kunjungan rumah (home visit), memfasilitasi pertemuan P2K2, memberikan edukasi dan motivasi kepada KPM, serta melaksanakan proses graduasi mandiri.

Tabel 4. 4 Data Jumlah KPM Wilayah dampingan Bapak Rudi (Pendamping PKH)

| Desa            | Jumlah KPM |
|-----------------|------------|
| Tambakmenjangan | 124        |
| Gempoltumloko   | 95         |
| Sarirejo        | 65         |

Sumber: Pendamping PKH

### d. Pemerintah Desa

Pemerintah desa berperan sebagai mitra pelaksana yang mendukung pendamping PKH dalam verifikasi data, penyediaan tempat pertemuan, dan identifikasi warga yang layak untuk graduasi. Kepala Desa Tambakmenjangan menyatakan:

"...Biasanya pendamping PKH laporan ke kita kalau mau ada kegiatan, perubahan data, kendala. Kita juga biasanya di kantor bahas siapa saja warga warga yang layak keluar PKH atau graduasi karena ekonominya sudah membaik..."(Hasil wawancara dengan Kepala Desa Pak Aziz pada 7 April 2026)

### e. Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

KPM adalah subjek utama program yang berkewajiban memenuhi syarat kepesertaan (mengikuti P2K2, memastikan anak sekolah, memeriksakan kesehatan) dan pada akhirnya diharapkan mampu keluar dari program melalui graduasi mandiri.

#### 4.2.3 Mekanisme Kerja dan Pelaksanaan PKH di Desa Tambakmenjangan

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan serta Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial, pelaksanaan PKH dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu penetapan KPM, verifikasi dan validasi data, penyaluran bantuan sosial, pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2), verifikasi komitmen, pemutakhiran data, hingga proses graduasi bagi KPM yang telah memenuhi kriteria. Berdasarkan hasil penelitian di Desa Tambakmenjangan, tahapan tersebut dilaksanakan sebagai berikut.

Pelaksanaan PKH di Desa Tambakmenjangan mengikuti prosedur berjenjang yang ditetapkan Kementerian Sosial. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, mekanisme kerja PKH di desa ini mencakup tahapan sebagai berikut.

##### a. Pendataan dan Pengusulan Calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

Tahap awal pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) diawali dengan proses pendataan dan pengusulan calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pendataan dilakukan melalui pemerintah desa/kelurahan dengan mengacu pada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Masyarakat yang tergolong miskin atau rentan miskin dapat teridentifikasi melalui pendataan yang dilakukan oleh pemerintah desa maupun melalui usulan masyarakat yang belum tercantum dalam data kesejahteraan sosial. Selanjutnya, usulan tersebut dibahas dan diverifikasi di tingkat desa/kelurahan melalui mekanisme yang berlaku sebelum disampaikan kepada pemerintah daerah untuk diproses lebih lanjut sebagai bagian dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

"...Untuk menentukan siapa saja yang akan mendapatkan bantuan itu kita biasanya melakukan pendataan dan ada juga yang mengusulkan diri ataupun diusulkan. Dari pendataan atau usulan-usulan itu nanti kita bahas di rapat apakah mereka benar-benar layak mendapatkan bantuan, tetapi belum tentu data yang kita daftarkan itu terpilih semua, karena pemerintah desa hanya membantu mendata, bukan yang menetapkan..."(Hasil wawancara dengan Kepala Desa Pak Aziz pada 7 April 2026)

Di Desa Tambakmenjangan, pemerintah desa berperan dalam memberikan informasi mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat serta berkoordinasi dengan

pendamping PKH dan Dinas Sosial apabila terdapat perubahan data atau usulan masyarakat yang layak menjadi calon penerima bantuan sosial. Proses ini bertujuan agar data calon penerima manfaat sesuai dengan kondisi riil di lapangan sehingga pelaksanaan PKH dapat lebih tepat sasaran.

#### **b. Penetapan dan Verifikasi KPM**

Data penerima manfaat PKH bersumber dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. sedangkan verifikasi kondisi lapangan dilakukan oleh pendamping PKH. Sebagaimana dijelaskan oleh Dinas Sosial:

"...Data penerima berasal dari DTSEN yang menjadi dasar penetapan penerima manfaat oleh pemerintah pusat. Setelah itu, pendamping PKH melakukan pendampingan di lapangan, termasuk melakukan verifikasi, validasi, pemutakhiran data, serta pertemuan rutin dengan KPM. Dinas Sosial melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan tersebut agar berjalan sesuai ketentuan..."(Hasil wawancara dengan Koordinator PKH Pak Dani pada 9 April 2026)

Kunjungan rumah dilakukan untuk memverifikasi kondisi sosial ekonomi keluarga, memastikan kesesuaian data dengan kondisi aktual di lapangan, mengidentifikasi perubahan komponen kepesertaan, serta menjadi dasar dalam proses pemutakhiran data. Hasil verifikasi tersebut juga dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam mengidentifikasi KPM yang berpotensi untuk graduasi apabila telah memenuhi kriteria. Pendamping juga berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk memperoleh informasi terkini mengenai kondisi sosial ekonomi warga:

"...Saya selalu koordinasi dengan pihak desa terlebih dahulu. Saya juga biasanya ke balai desa buat cek data warga supaya tidak salah sasaran..."(Hasil wawancara dengan Pendamping PKH Pak Rudi pada 9 April 2026)

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pembagian peran antara pihak yang menetapkan dan pihak yang memverifikasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), berikut disajikan matriks alur penetapan dan verifikasi KPM berdasarkan hasil penelitian.

Tabel 4. 5 Alur Penetapan dan Verifikasi KPM

| No. | Tahapan                           | Pihak yang Berperan                          | Peran/Kewenangan     | Keterangan                                                                                           |
|-----|-----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Sumber data awal                  | Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) | Basis data acuan     | Dikelola dan diperbarui oleh pemerintah pusat                                                        |
| 2   | Penetapan peserta PKH             | Kementerian Sosial RI (pemerintah pusat)     | Menetapkan           | Menetapkan KPM berdasarkan DTSEN; desa dan pendamping tidak berwenang menetapkan                     |
| 3   | Verifikasi dan validasi lapangan  | Pendamping PKH                               | Memverifikasi        | Kunjungan rumah, mengecek kesesuaian data dengan kondisi riil, memutakhirkan data melalui SIKS-Droid |
| 4   | Konfirmasi kondisi sosial ekonomi | Pemerintah Desa (Kepala Desa/perangkat desa) | Mendukung verifikasi | Memberi informasi dan konfirmasi kondisi warga, mengusulkan pembaruan data                           |
| 5   | Koordinasi dan pengawasan         | Dinas Sosial Kabupaten Lamongan              | Mengoordinasikan     | Memastikan proses verifikasi dan penetapan berjalan sesuai ketentuan                                 |

Sumber: Diolah oleh peneliti berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan (2026)

Tabel tersebut menegaskan bahwa kewenangan penetapan KPM berada sepenuhnya di tangan pemerintah pusat berdasarkan DTSEN, sedangkan pendamping PKH berperan sebagai pihak yang memverifikasi kondisi riil di lapangan melalui kunjungan rumah.

### c. Penyaluran Bantuan Sosial

Penyaluran bantuan dilakukan setelah data kepesertaan dinyatakan valid sesuai hasil pemutakhiran dan penetapan pemerintah. Penyaluran bantuan PKH dilakukan secara non-tunai melalui rekening bank yang ditunjuk pemerintah, atau melalui pos penyalur bagi lansia terlantar, penyandang disabilitas berat, dan daerah yang belum memiliki infrastruktur perbankan yang memadai. Penyaluran dilakukan setiap tiga

bulan sekali. Mekanisme non-tunai ini bertujuan meningkatkan akurasi, transparansi, dan akuntabilitas penyaluran bantuan.

**d. Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)**

P2K2 merupakan bentuk intervensi non-tunai dalam PKH yang bertujuan meningkatkan kapasitas keluarga sehingga mampu mencapai kemandirian ekonomi dan sosial. Kegiatan P2K2 juga merupakan forum edukasi wajib yang diselenggarakan satu kali setiap bulan di masing-masing dusun. P2K2 menjadi media utama pendamping untuk menyampaikan materi kemandirian kepada KPM. Materi P2K2 disusun oleh Kementerian Sosial sebagai pedoman bagi pendamping PKH dalam memberikan edukasi kepada KPM. Materi ini bertujuan meningkatkan pengetahuan, mengubah perilaku, dan mendorong kemandirian keluarga. Secara umum, modul P2K2 meliputi:

1. Pendidikan dan Pengasuhan Anak
2. Kesehatan dan Gizi
3. Pengelolaan Keuangan Keluarga
4. Perlindungan Anak
5. Kesejahteraan Sosial

Pendamping PKH menyampaikan bahwa melalui P2K2, KPM tidak hanya mendapatkan informasi mengenai hak dan kewajiban, tetapi juga mendapat motivasi dan keterampilan praktis yang dapat menopang kemandirian mereka:

"...Harusnya mereka sudah paham kalau terkait tujuan program PKH, karena di pertemuan P2K2 saya selalu mengingatkan terkait ini dan di pertemuan P2K2 juga ada materi terkait bagaimana cara mereka harus mandiri, saya juga sering memberikan motivasi-motivasi agar mereka tidak selalu bergantung dengan bantuan sosial..." (Hasil wawancara dengan Pendamping PKH Pak Rudi pada 9 April 2026)

Dari sisi KPM, beberapa peserta menyatakan bahwa mereka mengikuti P2K2 secara rutin dan mengingat beberapa materi yang disampaikan:

"...Saya kalau ada kumpulan PKH itu ikut terus mbk, kalau materinya yang diingat itu cara mengolah uang, diajari juga menabung supaya lebih mandiri terus tidak bergantung sama PKH, banyak mbk materinya tapi ya ada yang lupa..." (Hasil wawancara dengan KPM Ibu Nur Hasanah pada 25 April 2026)

"...Ikut terus mbk, saya itu semangat banget mbk kalau ada kumpulan PKH, soalnya kadang itu dikasih info cairnya tanggal berapa gitu, kalau materinya yang diingat itu diajarin buka usaha, terus kadang diajari untuk mencatat pengeluaran supaya nggak boros terus tidak bergantung sama PKH..." (Hasil wawancara dengan KPM Ibu Lia pada 25 April 2026)

Gambar 4. 2 Kegiatan Pertemuan P2K2 PKH di Desa Tambakmenjangan



Sumber: Dokumentasi Penelitian Oleh Peneliti

#### e. Verifikasi Komitmen KPM

Verifikasi komitmen merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendamping PKH untuk memastikan bahwa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) telah memenuhi kewajiban sebagai peserta Program Keluarga Harapan. Kegiatan ini dilakukan secara berkala dengan memantau kepatuhan KPM terhadap komitmen di bidang pendidikan dan kesehatan sesuai dengan ketentuan program.

Pada bidang pendidikan, pendamping memastikan bahwa anak usia sekolah dari keluarga penerima manfaat tetap terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan belajar di satuan pendidikan. Sementara itu, pada bidang kesehatan, pendamping melakukan pengecekan terhadap kepatuhan ibu hamil, balita, maupun anggota keluarga yang menjadi komponen kesehatan untuk memanfaatkan layanan kesehatan sesuai

jadwal yang telah ditetapkan. Hasil verifikasi komitmen tersebut menjadi salah satu dasar dalam pelaksanaan pendampingan serta evaluasi kepatuhan KPM terhadap kewajiban sebagai penerima manfaat PKH.

#### **f. Pemutakhiran Data KPM**

Selain melakukan verifikasi komitmen, pendamping PKH juga melaksanakan pemutakhiran data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara berkala. Pemutakhiran data bertujuan untuk memastikan bahwa informasi mengenai kondisi keluarga penerima manfaat selalu sesuai dengan keadaan aktual di lapangan. Perubahan data yang diperbarui meliputi identitas anggota keluarga, kondisi sosial ekonomi, komponen kepesertaan, perubahan alamat, status pendidikan, status kesehatan, maupun perubahan lain yang memengaruhi kepesertaan dalam Program Keluarga Harapan.

Dalam pelaksanaannya, pendamping melakukan pendataan langsung melalui kunjungan lapangan serta memasukkan hasil pemutakhiran ke dalam aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS-Droid) yang terintegrasi dengan sistem Kementerian Sosial. Data yang telah diperbarui menjadi dasar dalam pengambilan keputusan terkait keberlanjutan kepesertaan, penyesuaian komponen bantuan, maupun penetapan KPM yang telah memenuhi kriteria untuk mengikuti proses graduasi.

#### **4.2.4 Tahapan Proses Graduasi Mandiri di Desa Tambakmenjangan**

Graduasi mandiri merupakan tahapan paling krusial dalam implementasi PKH karena menjadi tolak ukur keberhasilan program dalam mendorong kemandirian KPM. Berdasarkan Kepdirjen Nomor 03/3/BS.01.02/10/2020, graduasi mandiri terjadi ketika KPM secara sukarela menyatakan diri telah mampu secara ekonomi dan keluar dari kepesertaan PKH. Berikut adalah proses pelaksanaan graduasi mandiri di Desa Tambakmenjangan berdasarkan hasil penelitian.

##### **a. Tahap Identifikasi Calon KPM yang Layak Graduasi**

Proses graduasi diawali dari identifikasi KPM yang diduga kondisinya ekonomi sudah membaik. Identifikasi dilakukan melalui dua jalur: pertama, informasi dari

perangkat desa atau ketua kelompok PKH yang mengetahui kondisi langsung warga; kedua, pengamatan langsung pendamping saat kunjungan rumah. Dinas Sosial juga menegaskan bahwa faktor kesadaran KPM menjadi kunci utama:

"...Faktor yang paling menentukan adalah ketika mereka sudah memiliki kesadaran bahwa bantuan hanya bersifat sementara dan memiliki keinginan untuk mandiri, maka peluang untuk graduasi akan lebih besar. Selain itu, usaha yang dijalankan, dukungan keluarga, dan kualitas pendampingan dari pendamping PKH juga sangat mempengaruhi keberhasilan graduasi mandiri..."(Hasil wawancara dengan Koordinator Kabupaten Pak Dani pada 9 April 2026)

#### **b. Tahap Pengecekan Kondisi Ekonomi KPM**

Setelah calon KPM graduasi teridentifikasi, pendamping melakukan kunjungan rumah untuk memverifikasi kondisi ekonomi secara langsung. Pendamping mengecek apakah KPM sudah memiliki penghasilan tetap, usaha produktif, atau kondisi lain yang menunjukkan kemampuan untuk hidup mandiri tanpa bantuan PKH. Data dari DTSEN juga menjadi rujukan, di mana KPM yang berada pada desil 4 ke atas mulai dipertimbangkan sebagai kandidat graduasi. Kepala Desa juga terlibat dalam tahap ini untuk memberikan konfirmasi kondisi sosial-ekonomi warga:

"...Kita juga biasanya di kantor bahas siapa saja warga yang layak keluar PKH atau graduasi karena ekonominya sudah membaik..."(Hasil wawancara dengan Kepala Desa Pak Aziz pada 7 April 2026)

#### **c. Tahap Sosialisasi dan Pendekatan Persuasif kepada KPM**

Tahap ini merupakan tahap yang paling memerlukan keahlian komunikasi dan kesabaran dari pendamping. Perlu ditegaskan bahwa pendekatan persuasif ini tidak dilakukan secara menyeluruh kepada seluruh KPM, melainkan hanya ditujukan kepada KPM yang telah teridentifikasi dan diverifikasi kondisi ekonominya pada tahap sebelumnya (Tahap Identifikasi Calon KPM yang Layak Graduasi dan Tahap Pengecekan Kondisi Ekonomi KPM), yaitu KPM yang dinilai sudah mendekati atau memenuhi kriteria untuk graduasi. Pendamping melakukan pendekatan secara pelan-pelan dan humanis kepada KPM yang telah masuk dalam target tersebut, bukan kepada KPM secara umum yang masih tergolong belum mampu secara

ekonomi. Strategi yang digunakan Pak Rudi adalah modeling sosial, yakni menunjukkan contoh nyata dari lingkungan sekitar KPM yang berhasil mandiri setelah keluar dari PKH:

"...Kalau saya biasanya dapat kabar dari perangkat desa ataupun mencari informasi ke KPM meskipun terkadang KPM juga tidak berani untuk menjawab, setelah sudah menemukan targetnya, kita cek dulu kondisi ekonominya, kalau memang sudah mampu, saya biasanya saya ajak ngobrol pelan2 supaya mereka mau keluar secara sukarela/mandiri..."( Hasil wawancara dengan Pendamping PKH Pak Rudi pada 7 April 2026)

"...Saya sering kasih contoh tetangga mereka yang sudah sukses duluan dan keluar dari PKH. Saya juga selalu yakinkan kalau mereka bisa usaha sendiri, rezekinya malah bisa lebih banyak daripada tunggu bantuan..."(Hasil wawancara dengan Pendamping PKH Pak Rudi pada 7 April 2026)

Dinas Sosial juga mendukung strategi ini melalui pertemuan P2K2 yang diarahkan untuk membangun kesadaran KPM:

"...Memberikan edukasi kepada KPM melalui Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga atau P2K2. Dalam pertemuan tersebut, pendamping memberikan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan keluarga, pentingnya pendidikan anak, kesehatan, serta motivasi untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Kami juga mendorong KPM memanfaatkan berbagai program pemberdayaan ekonomi yang tersedia sehingga mereka memiliki penghasilan yang lebih baik dan siap keluar dari kepesertaan PKH..."(Hasil wawancara dengan Koordinator Kabupaten Pak Dani pada 9 April 2026)

#### **d. Tahap Penandatanganan Surat Pernyataan Graduasi**

Apabila KPM bersedia keluar secara sukarela, maka dibuatkan surat pernyataan graduasi mandiri yang ditandatangani KPM di atas materai. Penandatanganan ini menjadi bukti kesanggupan sukarela KPM untuk melepaskan bantuan PKH. Seperti yang diungkapkan pendamping:

"...Nanti kita kasih surat pernyataan graduasi mandiri dengan tanda tangan di atas materai, baru nanti datanya dihapus di sistem..."(Hasil wawancara dengan Pendamping PKH Pak Rudi pada 7 April 2026)

KPM yang berhasil melakukan graduasi mandiri pertama kali di desa Tambakmenjangan ini yakni ibu Tani, menyatakan bahwa kesiapannya murni berasal dari kesadaran diri sendiri:

"...Ya soalnya saya merasa sudah mampu dan anak-anak saya juga sudah dapat pekerjaan yang enak. Jadi waktu kemarin saya didatangi Pak Rudi juga saya bilang saya siap keluar dari PKH..."(Hasil wawancara dengan KPM Graduasi ibu Tani pada 22 April 2026)

Gambar 4. 3 Surat Pernyataan

**SURAT PERNYATAAN GRADUASI MANDIRI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Nama           | : TANI                      |
| NIK            | : [REDACTED]                |
| Alamat         | : DUSUN TIMBUHAN 001 RW 001 |
| Desa/Kelurahan | : TAMBAKMENJANGAN           |
| Kecamatan      | : SARIREJO                  |
| Kabupaten/Kota | : LAMONGAN                  |
| Provinsi       | : JAWA TIMUR                |

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk Graduasi Mandiri dan kepesertaan Program Keluarga Harapan (PKH) Bantuan Sosial karena:

1. Kondisi ekonomi keluarga saya saat ini sudah lebih baik dan mampu memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri.
2. Saya memiliki usaha/pekerjaan yang dapat menjadi sumber penghasilan keluarga.
3. Saya siap dan sanggup melepaskan kepesertaan sebagai penerima bantuan sosial.
4. Saya memahami bahwa setelah graduasi mandiri, saya tidak akan lagi menerima bantuan sosial dari program yang saya ikuti.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa paksaan dari pihak manapun, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lamongan, 22 April 2026

Yang membuat pernyataan,

TANI

Pendamping Sosial PKH: RUDianto, S.IP

Mengetahui: Kepala Desa Tambakmenjangan: NURUL AZIZ

Sumber: Pendamping PKH

#### e. Tahap Penghapusan data dari sistem

Langkah terakhir adalah penghapusan data KPM yang telah graduasi dari sistem informasi PKH oleh pendamping menggunakan aplikasi SIKS-Droid. Data yang dihapus kemudian diverifikasi di tingkat pusat. Namun, dalam proses ini terdapat kendala teknis yang pernah dialami pendamping:

"...Kendalanya biasanya kalau saya di masalah data yang tidak sinkron, sinyal susah pas mau input laporan. Waktu itu saya pernah melakukan graduasi dan ternyata orang yang sudah saya graduasi di tahun 2025 malah masih dapat sampai tahun 2026. Nah itu kan masalah di datanya, akhirnya dilakukan graduasi ulang..."(Hasil wawancara dengan pendamping PKH Pak Rudi pada 7 April 2026)

Berdasarkan hasil penelitian, setelah seluruh tahapan tersebut dilaksanakan, capaian graduasi mandiri di Desa Tambakmenjangan masih tergolong rendah. Selama periode 2023–2025 belum terdapat KPM yang melakukan graduasi mandiri, sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan pendamping PKH, pada tahun 2026 terdapat satu KPM yang telah melakukan graduasi mandiri di Desa Tambakmenjangan.

Tabel 4. 6 Data Jumlah Graduasi Mandiri Kabupaten Lamongan, Kecamatan Sarirejo, Desa Tambakmenjangan Tahun 2023-2025

| Tahun | Kabupaten<br>Lamongan | Kecamatan Sarirejo | Desa<br>Tambakmenjangan |
|-------|-----------------------|--------------------|-------------------------|
| 2023  | 30                    | 0                  | 0                       |
| 2024  | 193                   | 7                  | 0                       |
| 2025  | 461                   | 13                 | 0                       |

Sumber: Dinas Sosial Lamongan

#### 4.2.5 Dinamika Respons Keluarga Penerima Manfaat terhadap Proses Graduasi

Selain menggambarkan tahapan pelaksanaan graduasi mandiri, hasil penelitian juga menunjukkan adanya dinamika respons Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terhadap proses tersebut. Respons KPM menjadi temuan penting karena memperlihatkan bagaimana penerima manfaat memandang kebijakan graduasi mandiri yang dijalankan oleh pendamping PKH.

Mayoritas KPM di Desa Tambakmenjangan menunjukkan kecenderungan mempertahankan status kepesertaan PKH. Salah satu temuan yang menonjol adalah respons KPM ketika ditawarkan Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi yang dipersiapkan bagi KPM yang telah memiliki potensi usaha untuk menuju kemandirian.

Hampir seluruh KPM yang ditawarkan mengikuti program PENA memilih tetap bertahan sebagai peserta PKH dibandingkan beralih ke skema pemberdayaan yang menuntut pengelolaan usaha secara mandiri. Sikap ini secara konsisten muncul baik pada KPM yang telah menerima bantuan dalam waktu lama maupun yang tergolong baru. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar KPM masih memandang bantuan PKH sebagai bentuk jaminan yang lebih pasti dibandingkan memulai usaha secara mandiri.

Berbeda dengan mayoritas KPM, penelitian ini menemukan satu kasus graduasi mandiri yang menunjukkan respons positif terhadap kebijakan tersebut. KPM atas nama Ibu Tani menyatakan kesediaannya untuk keluar dari kepesertaan PKH secara sukarela pada tahun 2026 tanpa memerlukan pendekatan persuasif yang berulang dari pendamping.

"...Ya soalnya saya merasa sudah mampu dan anak-anak saya juga sudah dapat pekerjaan yang enak. Jadi waktu kemarin saya didatangi Pak Rudi juga saya bilang saya siap keluar dari PKH..."(Hasil wawancara dengan KPM Graduasi Ibu Tani pada 22 April 2026)

Temuan tersebut menunjukkan adanya dua pola respons KPM terhadap proses graduasi mandiri. Sebagian besar KPM masih menunjukkan resistensi karena memandang bantuan PKH sebagai sumber dukungan ekonomi yang lebih pasti dibandingkan menjalankan usaha secara mandiri. Sebaliknya, sebagian kecil KPM telah memiliki kesiapan untuk melakukan graduasi mandiri setelah merasa kondisi ekonomi keluarganya telah membaik. Perbedaan respons tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi graduasi mandiri tidak hanya ditentukan oleh mekanisme pelaksanaan program, tetapi juga oleh kesiapan dan kesadaran masing-masing KPM untuk mencapai kemandirian ekonomi.

#### **4.2.6 Kendala dalam Pelaksanaan Implementasi PKH dalam mendorong Graduasi Mandiri**

Selain menggambarkan tahapan pelaksanaan dan respons KPM terhadap graduasi mandiri, Hasil wawancara juga mengungkapkan sejumlah kendala yang disampaikan langsung oleh informan penelitian dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tambakmenjangan.

Terkait upaya mengubah pola pikir Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar tidak bergantung pada bantuan, pendamping PKH mengungkapkan:

"...Susahnya mengubah pola pikir warga yang sudah terlalu nyaman dapat bantuan. Sudah berkali-kali juga saya memberi motivasi supaya tidak bergantung dengan bantuan, tetapi ternyata jawaban yang saya dapatkan malah `enak dapat bantuan pak` maka dari itu kan saya harus lebih effort untuk memberikan selalu motivasi..."(Hasil wawancara dengan pendamping PKH Pak Rudi pada 7 April 2026)

Selain itu, terdapat pula KPM yang sebenarnya sudah mampu secara ekonomi namun enggan keluar dari kepesertaan PKH, sebagaimana disampaikan oleh pendamping:

"...Ada yang sebenarnya sudah mampu tetapi diam saja. Mereka merasa sayang kalau bantuannya dicabut. Maka dari itu pendamping harus bisa mengubah pola pikir KPM..." (Hasil wawancara dengan pendamping PKH Pak Rudi pada 7 April 2026)

Kendala juga diakui pada tingkat kabupaten, sebagaimana disampaikan oleh koordinator Kabupaten:

"...Setiap tahun memang ada KPM yang berhasil melakukan graduasi mandiri, namun jumlahnya masih belum sepenuhnya sesuai harapan. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi ekonomi masing-masing keluarga yang berbeda-beda..." (Hasil wawancara dengan koordinator kabupaten Pak Dudi pada 7 April 2026)

Data-data tersebut selanjutnya dianalisis lebih lanjut pada bagian Hasil penelitian untuk mengidentifikasi hambatan implementasi PKH dalam mendorong graduasi mandiri berdasarkan model Edward III.

#### **4.3 Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi PKH dalam mendorong graduasi mandiri di Desa Tambakmenjangan dianalisis menggunakan model implementasi kebijakan publik George C. Edward III. Model ini mengemukakan empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, yang saling berinteraksi dan menentukan keberhasilan implementasi sebuah kebijakan. Analisis berikut mengkaji sejauh mana keempat variabel tersebut berjalan dalam konteks

pelaksanaan PKH di Desa Tambakmenjangan, serta menjelaskan hambatan yang menyebabkan capaian graduasi mandiri masih sangat rendah.

#### 4.2.1 Komunikasi

Komunikasi adalah variabel pertama dalam model Edward III yang berkenaan dengan bagaimana informasi mengenai kebijakan disampaikan kepada pelaksana dan kelompok sasaran, baik dari segi kejelasan, konsistensi pesan, maupun pemahaman penerima terhadap tujuan kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme komunikasi dalam pelaksanaan PKH di Desa Tambakmenjangan telah berjalan melalui dua jalur utama: pertemuan P2K2 bulanan dan jaringan ketua kelompok PKH di masing-masing dusun. Informasi mengenai tujuan program, kewajiban KPM, serta pentingnya graduasi mandiri disampaikan secara rutin dalam setiap pertemuan. Dari sisi kelancaran transmisi pesan, mekanisme ini terbilang terstruktur dan mampu menjangkau seluruh KPM meskipun kondisi geografis antardusun cukup berjauhan.

Namun demikian, terdapat temuan penting: kejelasan dan konsistensi penyampaian pesan tidak serta-merta menghasilkan perubahan orientasi nilai KPM. Fakta bahwa sebagian KPM telah menerima bantuan lebih dari satu dekade tanpa perkembangan signifikan menuju kemandirian mengindikasikan bahwa terdapat hambatan kognitif dalam proses internalisasi pesan. Hambatan ini tidak bersumber dari ketiadaan informasi, melainkan dari mentalitas ketergantungan yang telah mengakar. Sebagian KPM memahami konsep graduasi mandiri namun pemahaman tersebut belum diikuti oleh perubahan sikap maupun perilaku menuju kemandirian.

Temuan ini menunjukkan bahwa kualitas komunikasi dalam konteks PKH tidak semata-mata ditentukan oleh frekuensi penyampaian pesan, tetapi juga oleh kemampuan pendamping dalam membangun komunikasi dua arah yang mampu mengubah cara pandang penerima terhadap tujuan program. Dari perspektif Edward III, variabel komunikasi dalam implementasi PKH di Desa Tambakmenjangan berjalan dengan baik pada aspek transmisi informasi, namun belum optimal dalam membangun perubahan pola pikir penerima manfaat. Temuan ini sejalan dengan Oktaviani dan Susetyo (2021) yang menyimpulkan bahwa

implementasi PKH masih menghadapi kendala dalam pemahaman penerima manfaat terhadap tujuan substansif program.

#### 4.2.2 Sumber Daya

Variabel kedua, sumber daya, mencakup sumber daya manusia, informasi, pendanaan, kewenangan, serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan agar implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif.

Berdasarkan data penelitian, sumber daya manusia (pendamping PKH) secara formal telah sesuai dengan pedoman yang berlaku. Namun kondisi lapangan menghadirkan tantangan tersendiri: satu pendamping menanggung tiga desa sekaligus dengan jarak antar dusun cukup jauh, di mana Desa Tambakmenjangan merupakan desa terbesar dengan 124 KPM dan empat dusun yang berjarak cukup jauh. Beban kunjungan rumah ke setiap KPM untuk memverifikasi kelayakan bantuan menambah intensitas kerja pendamping secara signifikan.

Persoalan pada aspek sumber daya terutama terlihat dari belum optimalnya program pemberdayaan ekonomi di tingkat desa, Kepala Desa sendiri mengakui bahwa program pemberdayaan ekonomi di desa belum berjalan optimal. Tanpa ekosistem pendukung yang memadai, upaya mendorong graduasi mandiri bertumpu sepenuhnya pada kapasitas dan inisiatif pendamping sosial. Kondisi ini sejalan dengan temuan Syahputra dan Sukmana (2024) yang menegaskan bahwa ketergantungan ekonomi sulit diatasi tanpa intervensi pemberdayaan yang komprehensif.

#### 4.2.3 Disposisi

Disposisi merujuk pada komitmen, nilai-nilai yang dipegang, serta cara pandang para pelaksana kebijakan terhadap program yang mereka jalankan. Disposisi yang positif dan sejalan dengan tujuan kebijakan akan mendorong implementasi yang lebih efektif.

Berdasarkan hasil wawancara terdapat pola yang kontras antara disposisi pelaksana dan disposisi KPM. Pendamping PKH, Bapak Rudi, menunjukkan komitmen personal yang tinggi, menempatkan dirinya bukan sekadar sebagai pelaksana administratif tetapi sebagai motivator dan agen perubahan. Pemerintah

desa juga menunjukkan disposisi kooperatif, meskipun terbatas oleh ketidakmampuan dalam mengintervensi data DTSEN yang berada di tangan pusat.

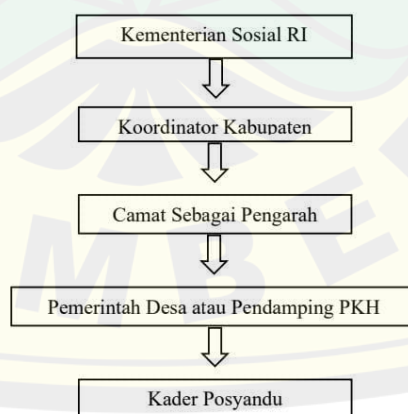
Sebaliknya, mayoritas KPM menunjukkan resistensi terhadap graduasi mandiri. Temuan menarik adalah respons KPM terhadap tawaran program alternatif berupa bantuan modal usaha (Program PENA): hampir seluruh KPM lebih memilih tetap menjadi penerima manfaat PKH dibandingkan beralih ke program pemberdayaan. Ini mengindikasikan bahwa mentalitas ketergantungan bukan semata-mata bersumber dari ketidaktahuan, melainkan juga dari preferensi rasional terhadap kepastian dan keteraturan bantuan tunai, dibandingkan risiko mengelola modal usaha secara mandiri.

Pengecualian nyata adalah Ibu Tani yang berhasil melakukan graduasi mandiri pada 2026. Kunci keberhasilannya adalah kombinasi perubahan kondisi ekonomi yang nyata (anak-anaknya telah bekerja) dan kesadaran sukarela dari dalam diri. Hal ini memperkuat argumen Riztiana dan Handoyo (2021) bahwa keberhasilan graduasi mandiri sangat ditentukan oleh perubahan kondisi ekonomi aktual dan motivasi intrinsik KPM.

#### 4.2.4 Struktur Birokrasi

Variabel keempat struktur birokrasi, berkenaan dengan mekanisme kerja, pembagian tugas, prosedur operasional standar, serta koordinasi antarlembaga dalam pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, alur pelaksanaan PKH di Desa Tambakmenjangan bersifat top-down:

Gambar 4. 4 Alur Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH)



Sumber: Diolah Peneliti

Pada level horizontal koordinasi antara pendamping dan pemerintah desa berjalan dengan baik. Pendamping rutin berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk memverifikasi data warga dan mengidentifikasi KPM yang dinilai layak graduasi. Pada level vertikal, yaitu koordinasi antara pelaksana lapangan dengan sistem pusat, masih terdapat kendala yang serius. Salah satunya adalah ketidaksinkronan data atau gangguan server antara aplikasi SIKS-Droid di lapangan dan sistem pusat mengakibatkan kasus KPM yang seharusnya sudah digraduasi tetapi masih tercatat aktif. Kondisi tersebut tidak hanya menunjukkan adanya persoalan teknis, tetapi juga mencerminkan lemahnya integrasi sistem informasi dalam struktur birokrasi PKH secara vertikal.

Persoalan lain pada aspek struktur birokrasi adalah mekanisme penetapan data kepesertaan yang sepenuhnya mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pemerintah desa tidak memiliki kewenangan untuk mengubah data tersebut secara langsung, melainkan hanya dapat mengusulkan pembaruan data melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Akibatnya, ketika terjadi ketidakakuratan data, pemerintah desa berada pada posisi yang terbatas dalam merespons keluhan masyarakat. Di satu sisi, terdapat warga yang dinilai layak namun belum terdaftar sebagai penerima manfaat, sedangkan di sisi lain masih terdapat penerima yang kondisi sosial ekonominya telah membaik tetapi tetap tercatat sebagai penerima manfaat. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kondisi sosial ekonomi riil di lapangan dengan basis data yang digunakan sebagai dasar penetapan kepesertaan Program Keluarga Harapan (PKH).

#### **4.2.5 Hambatan Implementasi PKH dalam mendorong Graduasi Mandiri di Desa Tambakmenjangan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis menggunakan model implementasi kebijakan Edward III pada keempat variabel sebelumnya, dapat diidentifikasi hambatan implementasi PKH dalam mendorong graduasi mandiri di Desa Tambakmenjangan sebagai berikut.

- a. Komunikasi, hambatan terletak pada belum optimalnya perubahan pola pikir KPM meskipun informasi telah disampaikan secara rutin dan terstruktur melalui P2K2. Konsistensi penyampaian pesan belum diikuti dengan internalisasi nilai kemandirian, sehingga sebagian KPM tetap bertahan dalam pola pikir ketergantungan meski telah menerima bantuan bertahun-tahun.
- b. Sumber Daya, Pendamping PKH bertanggung jawab mendampingi tiga desa dengan jarak antar dusun yang cukup berjauhan. Selain itu, pelaksanaan kunjungan rumah kepada setiap KPM untuk memverifikasi kelayakan bantuan semakin menambah intensitas tugas yang harus dijalankan, serta belum optimalnya program pemberdayaan ekonomi di tingkat desa sebagai ekosistem pendukung graduasi mandiri.
- c. Disposisi, hambatan utama terletak pada resistensi mayoritas KPM terhadap graduasi mandiri, yang tercermin dari kecenderungan mereka mempertahankan status kepesertaan PKH dibandingkan beralih ke program pemberdayaan ekonomi seperti PENA. Disposisi pelaksana, yaitu pendamping dan pemerintah desa, sendiri sudah positif, namun belum sepenuhnya mampu mengatasi resistensi tersebut.
- d. Pada aspek struktur birokrasi, hambatan terletak pada mekanisme penetapan data kepesertaan yang sepenuhnya bergantung pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dari pemerintah pusat, sehingga pemerintah desa tidak memiliki kewenangan langsung untuk mengubah data meskipun kondisi sosial ekonomi KPM di lapangan telah berubah, pemerintah desa hanya bisa mengusulkan perubahan data. Ketidaksinkronan data lintas tingkat pemerintahan turut memperlemah efektivitas koordinasi vertikal dalam pelaksanaan graduasi mandiri.

Keempat hambatan tersebut saling berkaitan dan membentuk lingkaran ketergantungan yang sulit diputus, sehingga capaian graduasi mandiri di Desa Tambakmenjangan masih sangat rendah. Kondisi ini juga diakui oleh Dinas Sosial Kabupaten Lamongan, yang menyatakan bahwa jumlah KPM yang berhasil melakukan graduasi mandiri masih belum sesuai dengan target yang ditetapkan karena sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi masing-masing keluarga. Oleh

karena itu, diperlukan intervensi yang terkoordinasi dan komprehensif dari seluruh aktor yang terlibat, mulai dari pemerintah pusat, Dinas Sosial, pemerintah desa, pendamping PKH, hingga KPM itu sendiri.



## BAB 5. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mendorong graduasi mandiri keluarga penerima manfaat di Desa Tambakmenjangan Kabupaten Lamongan, yang dianalisis menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edward III dengan empat Variabel utama, yaitu Komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Dari aspek komunikasi, penyampaian informasi mengenai PKH berjalan cukup baik melalui forum Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) bulanan dan jaringan ketua kelompok di setiap dusun, sehingga seluruh KPM dapat menjangkau informasi program secara rutin. Namun demikian, selancaran transmisi pesan tersebut belum diikuti oleh perubahan orientasi nilai KPM secara mendalam. Fakta bahwa sebagian KPM telah menerima bantuan lebih dari satu dekade tanpa perkembangan berarti menuju kemandirian menunjukkan bahwa pesan substantif mengenai tujuan graduasi mandiri belum sepenuhnya terinternalisasi oleh penerima manfaat.

Dari aspek sumber daya, jumlah dan kualifikasi pendamping sosial PKH secara formal telah sesuai dengan pedoman yang berlaku, tetapi beban kerja di lapangan cukup berat karena satu pendamping harus menangani 3 desa sekaligus, termasuk Desa Tambakmenjangan yang merupakan desa dengan jumlah KPM terbanyak dan jarak dusun yang berjauhan sehingga menghambat proses implementasi. Persoalan yang lebih mendasar ditemukan pada program pemberdayaan ekonomi di tingkat desa belum berjalan optimal, sehingga upaya mendorong kemandirian KPM masih sangat bergantung pada inisiatif pendamping sosial secara individual.

Dari aspek disposisi, pendamping PKH dan pemerintah desa menunjukkan komitmen serta orientasi nilai yang sejalan dengan tujuan kebijakan, sedangkan mayoritas KPM masih menunjukkan resistensi terhadap graduasi mandiri akibat mentalitas ketergantungan yang telah mengakar. Hal ini terlihat dari kecenderungan KPM untuk mempertahankan status kepesertaan PKH dibandingkan beralih ke

program pemberdayaan ekonomi alternatif yang ditawarkan. Pengecualian ditemukan pada satu KPM yang berhasil melakukan graduasi mandiri pada tahun 2026, yang didorong oleh kombinasi perubahan kondisi ekonomi yang nyata dan kesadaran internal untuk mandiri.

**Struktur Birokrasi.** Dari aspek struktur birokrasi, koordinasi antara pendamping sosial dan pemerintah desa pada level horizontal berjalan dengan cukup baik. Namun, pada level vertikal antara pelaksana lapangan dan sistem pusat masih terdapat kendala, terutama terkait ketidaksinkronal data serta keterbatasan kewenangan pemerintah desa dalam memperbarui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Kondisi ini menciptakan kesenjangan antara kondisi sosial ekonomi riil di lapangan dengan basis data yang digunakan sebagai dasar penetapan kepesertaan Program Keluarga Harapan (PKH).

Secara keseluruhan, implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tambakmenjangan dalam mendorong graduasi mandiri keluarga penerima manfaat belum berjalan optimal. Hal ini tercermin dari capaian graduasi mandiri yang masih sangat rendah, yaitu dari tahun 2023 – 2026 baru satu KPM pada tahun 2026 dari total 124 KPM yang terdaftar. Rendahnya capaian tersebut merupakan hasil akumulasi dari persoalan pada keempat variabel implementasi kebijakan yang saling berkaitan, yaitu komunikasi yang belum mampu mengubah pola pikir KPM secara mendalam, keterbatasan sumber daya pendukung pemberdayaan ekonomi, resistensi disposisi KPM akibat mentalitas ketergantungan, serta lemahnya koordinasi data secara vertikal dalam struktur birokrasi pelaksana PKH.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mendorong graduasi mandiri Keluarga Penerima Manfaat di Desa Tambakmenjangan, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian untuk meningkatkan pelaksanaan program ke depannya:

1. Bagi Dinas Sosial Kabupaten Lamongan

Berdasarkan temuan bahwa hambatan pada aspek struktur birokrasi terletak pada ketidaksinkronan data antara aplikasi SIKS-Droid di lapangan dengan sistem

pusat serta terbatasnya kewenangan pemerintah desa dalam memperbarui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), disarankan agar Dinas Sosial Kabupaten Lamongan mendorong perbaikan mekanisme sinkronisasi data secara berkala antara SIKS-Droid dan sistem pusat.

2. Bagi Pemerintah Desa Tambakmenjangan

Berdasarkan temuan bahwa program pemberdayaan ekonomi di tingkat desa belum berjalan optimal sehingga upaya mendorong kemandirian KPM masih sangat bergantung pada inisiatif pendamping secara individual, disarankan agar Pemerintah Desa Tambakmenjangan mengembangkan program pemberdayaan ekonomi yang konkret dan berkelanjutan bagi KPM, khususnya bagi KPM yang kondisi ekonominya sudah mendekati layak graduasi, serta lebih aktif mengusulkan pembaruan data KPM kepada Dinas Sosial sesuai kondisi riil di lapangan agar proses penetapan dan verifikasi kepesertaan lebih akurat.

3. Bagi Pendamping PKH

Berdasarkan temuan bahwa penyampaian informasi mengenai tujuan PKH dan graduasi mandiri telah dilakukan secara rutin melalui P2K2, namun sebagian besar KPM masih belum menunjukkan kesiapan untuk melakukan graduasi mandiri, disarankan agar pendamping PKH lebih mengoptimalkan pemantauan perkembangan kondisi sosial ekonomi KPM secara berkala. Pemantauan tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi KPM yang kondisi ekonominya telah mengalami peningkatan dan selanjutnya diberikan dorongan serta arahan untuk mempersiapkan proses graduasi secara bertahap. Selain itu, pendamping dapat mendorong KPM untuk memanfaatkan keterampilan dan sumber daya yang dimiliki melalui kegiatan ekonomi produktif, sehingga peningkatan kesejahteraan tidak hanya bergantung pada bantuan PKH. Dengan demikian, pendampingan tidak hanya berfokus pada pemenuhan kewajiban KPM selama menerima bantuan, tetapi juga pada kesiapan KPM dalam mencapai kemandirian ekonomi.

4. Bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

Berdasarkan temuan bahwa sebagian KPM telah menerima bantuan lebih dari satu dekade tanpa perkembangan berarti menuju kemandirian dan cenderung

memilih bertahan sebagai peserta PKH dibandingkan mengikuti program pemberdayaan ekonomi seperti PENA, disarankan agar KPM lebih terbuka terhadap program pemberdayaan ekonomi yang ditawarkan, memandang bantuan PKH sebagai dukungan sementara dan bukan sumber penghidupan jangka panjang, serta meningkatkan partisipasi aktif dalam P2K2 agar dapat mempercepat pencapaian kemandirian ekonomi menuju graduasi mandiri, sebagaimana dicontohkan oleh KPM yang telah berhasil graduasi mandiri.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Mengingat penelitian ini hanya berfokus pada satu desa dengan capaian graduasi mandiri yang masih sangat rendah (satu dari 124 KPM), disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk mengkaji lebih lanjut faktor-faktor yang secara spesifik mendorong keberhasilan graduasi mandiri, membandingkan implementasi PKH pada lokasi dengan capaian graduasi mandiri yang lebih tinggi, serta mengkaji efektivitas program pemberdayaan ekonomi alternatif seperti PENA dalam mendorong perubahan disposisi KPM agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi, H. (2024). *Manajemen Kemiskinan Inklusif dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan*. 206–225.
- Andini, S., Ode, W., & Kusuma, N. (2024). Pelaksanaan Graduasi Mandiri Keluarga Penerima Manfaat Dari Program Keluarga Harapan (Studi Pada Kelurahan Lepo-Lepo Kecamatan Baruga Kota Kendari). *WELVART: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 5(2), 123–136. 10.52423/welvaart.v5i2.41
- Anebelle, A., & Ramadhan, A. (2025). Implementasi Metode Kualitatif Dan Penerapan Dalam Penelitian. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 9(10), 91-100.
- Albi Anggito & Johan Setiawan (2018) Metode Penelitian Kualitatif.
- Asrulla, R., Jailani, M. S., & Jeka, F. (2023). Populasi dan sampling (kuantitatif), serta pemilihan informan kunci (kualitatif) dalam pendekatan praktis. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 26320-26332.
- Beni, S., Hapsari, V. R., & Vuspitasari, B. K. (2023). Dampak Program Keluarga Harapan Terhadap Kemandirian Keluarga Penerima Manfaat Di Bengkayang. *Prosiding Seminar Nasional Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 6, 398–404.
- Ebriyani, I. O. (2025). *Jurnal Pendidikan Ekonomi Indonesia Social Policy in Reducing Poverty in Indonesia : A Systematic*. 8(2), 1–22.
- Fernandya, S., Yuwono, T., & Al-Firdaus, L. K. (2022). Pengentasan Masalah Sosial Melalui People Centered Development Guna Memaksimalkan Pembangunan Di Indonesia. *Reformasi*, 12(1), 121–132. <https://doi.org/10.33366/rfr.v12i1.3324>
- Fitri, M., Achlami, A., Mukmin, H., & Jasmadi, J. (2023). *Empowerment of Islamic Communities in Indonesian Conditional Cash Transfer Program (Pkh) in Increasing Social Welfare in Sukarame District, Bandar Lampung*. <https://doi.org/10.4108/eai.20-9-2022.2334187>
- Gunawan, R., Hartiadi, M., Ibrahim, A. M., & Afda, V. (2024). *Peran Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan ( PKH ) Dalam Mendorong Graduasi Mandiri Keluarga Penerima Manfaat*. 3, 9969–9978.

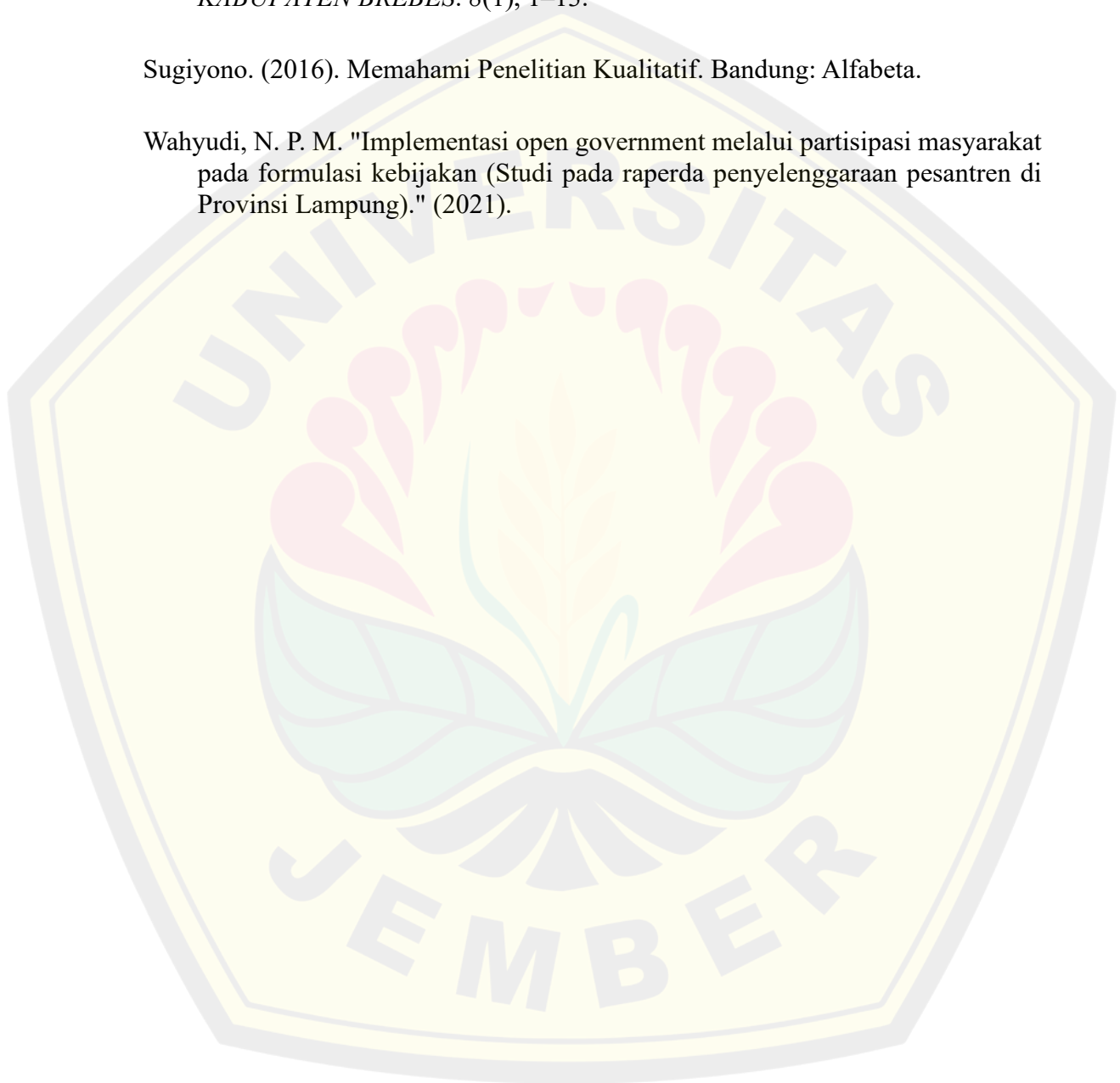
- Awalyah, A., & Hakim, A. E. Q. Y. D. (2025). *Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Makmur Jaya Kecamatan Kongbeng*.
- Khabibi, A., & Rodiyah, I. (2024). Challenges and Solutions in the Implementation of the Family Hope Program Tantangan dan Solusi dalam Implementasi Program Keluarga Harapan. *Indonesian Journal of Cultural and Community Development*, 15(3).
- KAFERA, N. C. (2021). *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Tanjung Qencono.pdf*. 167–186.
- Kanuna, R. S., & Nawawi, J. (2022). *Evaluasi Program Keluarga Harapan ( PKH ) dalam Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga Penerima Manfaat di Kecamatan Sopai Kabupaten Toraja Utara*. 4(1), 58–68.
- Khadijah, E. S. & N. (2021). *Graduating from a Conditional Cash Transfer Program in Indonesia :*
- Komarawati, K., Nurdin, M. F., Gunawan, W., & Nurwati, R. N. (2025). Transformative capacity to build an adaptive society resilience during crisis: evidence from conditional cash transfer/PKH Indonesia. *Frontiers in Sociology*, 10(May), 1–12. <https://doi.org/10.3389/fsoc.2025.1507177>
- Musliyandi, Hasanuddin, & Saeri, M. (2024). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menangani Masalah Kemiskinan Di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 5335–5346.
- Nurkhalim, R. F., Susilowati, I., & Jayanti, K. D. (2022). Program Keluarga Harapan: a conditional cash transfer to increase prenatal visits and birth weight. *Journal of Public Health in Africa*, 13(3), 1–8. <https://doi.org/10.4081/jphia.2022.1271>
- Putra, G. W., & Pujiyanto, P. (2020). Evaluasi Dampak Program Keluarga Harapan Terhadap Pemanfaatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk Layanan Persalinan di Indonesia (Analisis Data SUSENAS tahun 2018). *Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia*, 5(1). <https://doi.org/10.7454/eki.v5i1.3898>
- Qomaruddin, Q., & Sa'diyah, H. (2024). Kajian teoritis tentang teknik analisis data dalam penelitian kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. *Journal of Management, Accounting, and Administration*, 1(2), 77-84.

Silviana, D., & Chilmy, N. W. (2024). Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Mencapai Graduasi Mandiri di Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. *FORMULA Jurnal Administrasi Publik*, 1(2), 133–143.  
<https://ejurnal.uij.ac.id/index.php/fml/article/view/3099>  
<https://ejurnal.uij.ac.id/index.php/fml/article/download/3099/2153>

Sugiarto, E. (2024). *EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI KECAMATAN BULAKAMBA KABUPATEN BREBES*. 8(1), 1–13.

Sugiyono. (2016). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Wahyudi, N. P. M. "Implementasi open government melalui partisipasi masyarakat pada formulasi kebijakan (Studi pada raperda penyelenggaraan pesantren di Provinsi Lampung)." (2021).



**LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Dokumentasi Kegiatan
- Lampiran 2 : Dokumentasi Lokasi Penelitian
- lampiran 3 : Transkrip Wawancara
- Lampiran 4 : Data Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan  
Desa Tambakmenjangan (PKH)
- Lampiran 5 : Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018
- Lampiran 6 : Keputusan Direktur Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial  
Nomor: 03/3/BISA.02.01/10/2020 Tentang Petunjuk teknis  
Graduasi Mandiri Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga  
Harapan Tahun 2020
- Lampiran 7 : Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 186 / HUK /  
2022 Tentang Pelaksanaan Program Sembako dan Program  
Keluarga Harapan
- lampiran 8 : Data Jumlah Penduduk Miskin Jawa Timur 2023 - 2024
- lampiran 9 : Surat Pengantar Izin Penelitian oleh LP2M



